



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA

**(STUDI PADA KOPERASI UNIT DESA WARGO TANI MAKMUR
KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

MISDA DEWI UTARI

145030107111036



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Pada
Sumur Tua (Studi Kasus pada Koperasi Unit Desa Wargo
Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora)

Disusun oleh : Misda Dewi Utari

NIM : 145030107111036

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 10 April 2018

Komisi Pembimbing

Ketua


Dr. Mardiyono, M.P.A.

NIP. 19520523 197903 1 001

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Mei 2018

Jam : 10.00-11.00

Skrripsi atas Nama : Misda Dewi Utari

Judul : Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Pada
Sumur Tua (Studi pada Koperasi Unit Desa Wargo Tani
Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora)

Dan dinyatakan **LULUS**

Ketua

Dr. M. Ediyono, MPA
NIP.19520523 197903 1 001

Anggota

Dr. Imam Hafafi, M.Si, MS
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota

Firda Hidayat, S.Sos, M.PA, DPA
NIP. 19711013 200003 2 001

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 10 April 2018

Mahasiswa

Misda Dewi Utari

NIM.145030107111036



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Ayah saya, Bapak Usup Suharto. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan selalu menyemangati serta mendukung saya untuk segera menyelesaikan pendidikan saya. Serta kepada Ibu yang saya kagumi, Ibu Eni Setyowati yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk saudara-saudara kandung saya, kakak tercinta Reza Awang Setianto yang telah menjadi tulang punggung keluarga dan yang membiayai saya kuliah, berkat kerja keras dan jasanya saya dapat melanjutkan kuliah hingga selesai. Kepada adik tersayang Hafifah Putri Utami yang selalu menyemangati saya dan membantu menemani saya dalam proses penelitian ini.



Misda Dewi Utari, 2018. **Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua (Studi Pada Koperasi Unit Desa Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Mardiyono, MPA. 175 Halaman + xvii

RANGKUMAN

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu tahapan dari proses kebijakan dimana pada tahap ini merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan atas dasar keingintahuan penulis dalam mengimplementasikan suatu kebijakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora dalam pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua di struktur Banyubang. Implementasi kebijakan ini menyangkut tiga hal yaitu: 1) adanya tujuan dan sasaran kebijakan, 2) adanya aktivitas dalam pencapaian tujuan, 3) adanya hasil kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan mengenai pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua yang dilakukan oleh KUD Wargo Tani Makmur yang merupakan *pilot project* dalam mengusahakan penambangan minyak bumi pada sumur tua di struktur Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Blora, sedangkan situsnya berada di KUD Wargo Tani Makmur dan di Desa Bangowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, buku catatan, dan alat bantu lainnya.

Hasil penelitian ini mengacu pada model implementasi Van Meter Van Horn yang di dalamnya memuat variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, koordinasi para aktor, kondisi sosial dan ekonomi. Standar dan sasaran kebijakan penambangan ini cukup jelas. Sumber daya manusia dalam hal perijinan pengusahaan penambangan cukup baik namun dalam aktifitas penambangan lapangan masih kurang, sedangkan sumber daya alam yang ada sangat mendukung dan melimpah. Koordinasi para aktor yang terjalin cukup baik. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal masih rendah. Selain variabel tersebut terdapat dampak kebijakan yang ditimbulkan salah satunya rentannya konflik sosial masyarakat. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pertambangan, Minyak Bumi, KUD.



Misda Dewi Utari, 2018. **Implementation of Petroleum Mining Policy in Old Well (Study on Village Unit Cooperative Wargo Tani Makmur District Jiken Blora Regency)**. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer: Dr. Mardiyono, MPA. 175 pages + xvii

SUMMARY

Implementation of public policy is a stage of the policy process which at this stage is the implementation of the policy set. This research was conducted on the basis of the curiosity of the writer in implementing a policy by Village Unit Cooperative (KUD) Wargo Tani Makmur District Jiken Blora District in the exploitation of petroleum mining on the old wells in the structure Banyubang. Implementation of this policy concerns three things: 1) the existence of objectives and policy goals, 2) the existence of activities in the delivery of goals, 3) the existence of the results of activities. This study aims to describe and analyze the implementation process of the policy concerning the exploitation of petroleum mining on the old wells conducted by KUD Wargo Tani Makmur which is a pilot project in seeking the petroleum mining on the old well in the structure of Banyubang Bangowan Village, Jiken District, Blora Regency.

This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Blora Regency, while the site is in KUD Wargo Tani Makmur and in Bangowan Village, Jiken District, Blora Regency. Primary data sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data were obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques through interviews and documentation. While the instrument research is the researchers themselves, and some supporting tools such as interview guides, notebooks, and other aids.

The results of this study refer to the Van Meter Van Horn implementation model which contains standard variables and policy targets, resources, coordination of actors, social and economic conditions. The standards and targets of this mining policy are quite clear. Human resources in terms of mining concession permit are quite good but in mining activities in the field is still lacking, while the existing natural resources are very supportive and abundant. Coordination of the actors is quite good. The social and economic conditions of local communities are still low. In addition to these variables, there is a policy impact caused one of them vulnerable social conflict society. There are inhibiting factors and supporting factors in the implementation process of petroleum mining policy on the old wells.

Keywords: Implementation of Public Policy, Mining, Oil, KUD



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua (Studi Pada KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Biora)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Orang tua penulis, Bapak Usup Suharto dan Ibu Emi Setyowati yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya



4. Bapak Fadillah Amin, Dr.,M.AP.,Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr. Mardiyono.,MPA. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Bapak dan Ibu yang tergabung dalam KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
8. Bapak-bapak yang tergabung dalam Balai Pengkajian,3pengendalian dan pengawasan Energi Sumber Daya dan Mineral Wilayah Kendeng Selatan Kabupaten Blora yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
9. Saudara-saudariku tercinta yaitu Reza Awang Setianto dan Hafifah Putri Utami serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa



10. Sahabat – sahabatku Intan, Santi, Inggit, Rama, Alvi, Randhi, Dila, Adel, dan Reni yang senantiasa selalu memberikan semangat pantang menyerah dalam proses menyelesaikan skripsi

11. Seseorang yang ku sayang Luthfi Kauthar yang telah memberi semangat, doa, dan membantu selama proses menyelesaikan skripsi

12. Teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 April 2018

Penulis



DAFTAR ISI

COVER	Hal. i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RANGKUMAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Administrasi Publik	
1. Pengertian Administrasi Publik	16
2. Fungsi Administrasi Publik	18
3. Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik	18
B. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik	20
2. Bentuk Kebijakan Publik	21
3. Proses Kebijakan Publik	23
4. Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Publik	25
C. Implementasi Kebijakan	
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	26
2. Model Implementasi Kebijakan	27



D. Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua

1. Pengertian pertambangan.....	31
2. Kebijakan perizinan usaha pertambangan	32
3. Tahapan pertambangan.....	34
4. Asas pertambangan	35
5. Pengertian sumur tua	36
6. Pengusahaan sumur tua	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	43
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian	48
G. Metode Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
2. Gambaran Umum Situs Penelitian.....	57
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	
1. Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.	
a. Standar dan sasaran kebijakan	65
b. Sumber daya	69
c. Aktor atau organisasi yang terlibat.....	72
d. Koordinasi antar organisasi	74
e. Kondisi sosial dan ekonomi	82
f. Dampak kebijakan.....	87
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua.	
a. Faktor pendukung	94
b. Faktor penghambat.....	96
C. Analisis Data Penelitian	

1. Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.	
a. Standar dan sasaran kebijakan.....	100
b. Sumber daya.....	103
c. Aktor atau organisasi yang terlibat.....	104
d. Koordinasi antar organisasi.....	106
e. Kondisi sosial, dan ekonomi.....	108
f. Dampak kebijakan.....	110
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua.	
a. Faktor Pendukung.....	111
b. Faktor penghambat.....	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	122



DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1.	Produksi minyak bumi 1996-2015	6
2.	Jumlah penduduk Kabupaten Blora	57
3.	Jumlah penduduk Desa Bangowan	58
4.	Statistik penduduk berdasarkan pendidikan akhir	59
5.	Statistik penduduk berdasarkan pekerjaan	59
6.	Perbandingan kinerja swasta	85
7.	Data produksi sumur tua Banyubang	87



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1.	Peta persebaran cadangan minyak bumi Indonesia	3
2.	Cadangan minyak bumi Indonesia 2015	4
3.	Macam teknik pengumpulan data	46
4.	Komponen analisis data model interaktif	50
5.	Peta kabupaten Blora	55
6.	Foto KUD Wargo Tani Makmur	61
7.	Struktur organisasi KUD	62
8.	Titik sumur tua	71
9.	Alur permohonan pengusahaan pertambangan minyak sumur tua	76
10.	Surat perintah angkut	80
11.	Minyak siap kirim	81
12.	Imbalan jasa	92
13.	Bagi hasil produksi minyak	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi Publik merupakan suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah. Administrasi publik juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial (Henry 2014:6). Menurut Chander dan Plano yang dikutip oleh Keban (2014:3) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Pengertian mengenai administrasi publik tersebut, peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat mengatur keputusan dari kebijakan publik dalam memecahkan masalah publik. Dimana kebijakan publik merupakan salah satu bagian yang dilakukan oleh administrasi publik.

Kebijakan publik menurut Anderson yang dikutip oleh Wahab (2008:2) ialah perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu, yang mana kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai beberapa implikasi. Pertama, kebijakan publik selalu memiliki tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu. Kedua, kebijakan yang berisi tindakan pemerintah adalah sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain kebijakan publik merupakan cara pemerintah untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk dapat mengambil suatu keputusan dalam menghadapi dan memecahkan masalah publik. Suatu



kebijakan publik akan berhasil apabila dalam implementasinya dilakukan sesuai dengan tujuan.

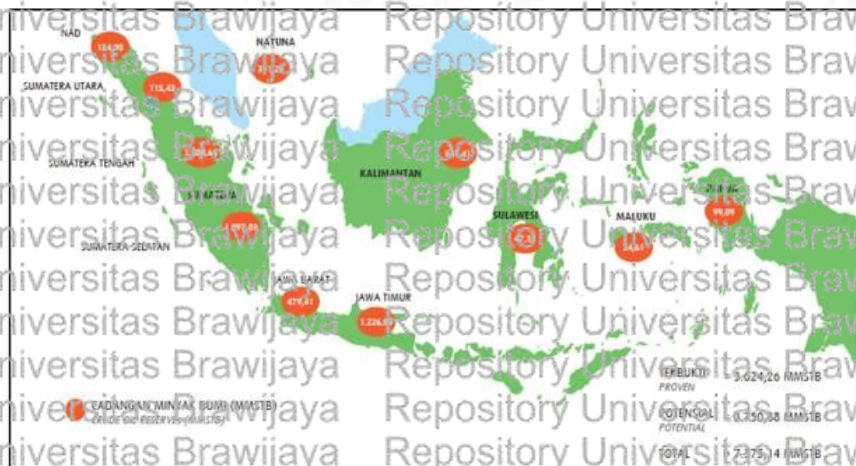
Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan, dengan kata lain implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana para aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerjasama untuk menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan kebijakan atau program-program (Winarno 2014:147). Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok tertentu mengenai tindakan apa yang harus dilakukan agar dapat sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari ketentuan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Permasalahan publik di Indonesia salah satunya dalam hal pertambangan, dimana Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) namun, masih belum dimanfaatkan secara optimal dan belum dapat mensejahterakan masyarakat. Berbagai jenis bahan tambang di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang besar dan memicu adanya eksploitasi sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ketentuan Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Bumi air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal ini berarti bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah air Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau

pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya.

Salah satu potensi pertambangan di Indonesia adalah pertambangan minyak bumi, yang memiliki berbagai fungsi bagi kehidupan manusia, seperti bahan dasar infrastruktur, sumber energi, infrastruktur, dan kendaraan bermotor. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang bisa didapatkan dari sumur minyak melalui suatu proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Minyak bumi merupakan golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang selama ini sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia sebagai bahan bakar dan sumber kehidupan. Berikut adalah peta mengenai persebaran cadangan minyak bumi di Indonesia.

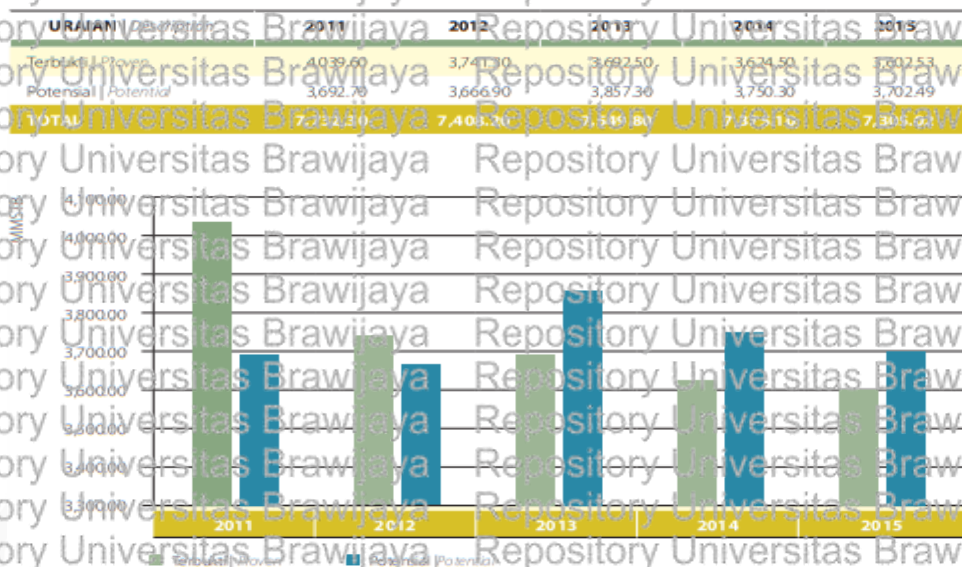


Gambar 1. Peta Persebaran Cadangan Minyak Bumi Indonesia
Sumber: Kementerian ESDM, 2017

Gambar diatas menunjukkan bahwa cadangan minyak bumi Indonesia tersebar diberbagai pulau antara lain di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Selain itu terdapat data mengenai jumlah cadangan minyak



bumi yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2. Cadangan Minyak Bumi Indonesia 2011-2015

Sumber: Kementerian ESDM, 2015.

Data mengenai cadangan minyak bumi di Indonesia tersebut diatas pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang menunjukkan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami penurunan.

Total cadangan minyak bumi Indonesia terbukti dan potensial tahun 2013 mencapai 7,54 miliar barel, menurun menjadi 7,37 miliar barel pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 turun menjadi 7,30 miliar barel.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (01/08/2017) menyatakan bahwa, potensi minyak bumi di Indonesia saat ini diperkirakan memiliki cadangan minyak sebesar 3,6 milyar barel. Jika dengan rata-rata produksi 800.000 barel per hari dan tanpa melakukan apapun maka diperkirakan Indonesia tidak dapat memproduksi minyak bumi dalam jangka



waktu 12 tahun. Mengantisipasi hal tersebut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menyatakan beberapa solusi agar dalam 12 tahun Indonesia masih dapat memproduksi minyak bumi antara lain dengan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Produksi cadangan minyak bumi sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan energi nasional dan mengurangi ketergantungan energi nasional dari impor (Kementerian ESDM, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ketentuan pasal 1 angka 5, kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, yang berarti bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pengaturan atau mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan usaha minyak dan gas bumi. Sebagaimana yang dimaksud dengan eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Kurangnya eksplorasi dan investasi lain di sektor minyak membuat produksi minyak Indonesia menurun, sedangkan konsumsi minyak Indonesia



menunjukkan tren naik yang stabil karena jumlah penduduk yang meningkat.

Peningkatan jumlah penduduk kelas menengah, dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan permintaan terhadap bahan bakar terus meningkat dan membuat Indonesia mengimpor bahan bakar dari beberapa negara. Berikut adalah data produksi minyak bumi dan gas alam Indonesia dari tahun ke tahun berdasarkan Badan Pusat Statistik.

Tabel 1. Produksi Minyak Bumi 1996-2015

Tahun	Minyak Mentah dan Kondensat (000 barel)	Gas Alam (MMscf)
1996	548 648,30	3 164 016,20
1997	545 752,60	3 166 098,30
1998	534 892,00	2 978 851,90
1999	494 643,00	3 068 349,10
2000	484 393,30	2 845 582,90
2001	480 116,10	3 762 828,50
2002	397 308,50	2 279 976,30
2003	383 700,00	2 142 605,00
2004	404 592,90	3 026 069,30
2005	387 693,50	2 985 344,00
2006	357 477,40	2 948 021,60
2007	348 343,00	2 805 540,30
2008	358 718,70	2 790 988,00
2009	346 313,00	2 887 892,20
2010	344 888,00	3 407 592,30
2011	329 249,30	3 256 378,90
2012	314 665,90	2 982 752,30
2013	301 191,90	2 969 210,80
2014	287 902,20	2 999 524,40
2015	286 814,20	2 948 365,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan adanya pertimbangan bahwa hasil produksi minyak bumi Indonesia yang terus menurun dari tahun ke tahun dan kurangnya eksplorasi dan eksploitasi Pemerintah Indonesia perlu membuat sebuah kebijakan publik untuk dapat mengatasi permasalahan produksi minyak bumi. Berdasarkan hal tersebut pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat kebijakan dengan mengeluarkan kebijakan publik yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi



Pada Sumur Tua. Sebagaimana yang dimaksud dengan sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi.

Sumur tua tersebut terletak pada lapangan yang tidak di usahakan pada suatu wilayah kerja yang terkait kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 4.000 titik sumur minyak tua di Indonesia yang berproduksi pada zaman Belanda dan kemudian akhirnya ditutup ketika Jepang masuk ke Indonesia. Sumur tua ini oleh PT. Pertamina, yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak bumi di Indonesia tidak lagi mengusahakan atau mengeksploitasi karena dianggap sudah tidak ekonomis lagi karena produksinya yang rendah tetapi ongkos produksinya tinggi.

Total sumur tua minyak bumi Indonesia mencapai 13.824 sumur dengan perincian: Sumatera bagian selatan 3.623 sumur, Sumatera bagian utara 2.392 sumur, Sumatera bagian tengah 1.633 sumur, Kalimantan Timur 3.143 sumur, Kalimantan Selatan 100 sumur, Jawa Tengah-Jawa Timur-Madura 2.496 sumur, Papua 208 sumur dan Seram 229 sumur. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas A. Edy Hermantoro menyatakan bahwa pemerintah berupaya mengaktifkan pengelolaan sumur tua oleh perusahaan lokal atau daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua (Kementerian ESDM, 2010).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, Pasal (2) dijelaskan bahwa dalam hal Kontraktor tidak mengusahakan dan



memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi setelah mendapat persetujuan Menteri. Kebijakan tersebut merupakan keinginan pemerintah untuk mengoptimalkan adanya potensi-potensi minyak bumi yang ada pada sumur tua untuk kemudian dapat dikelola kembali guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan. Selain itu dengan adanya kebijakan tersebut juga dapat menghilangkan adanya praktek-praktek illegal dalam pengelolaan sumur tua, yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sumur minyak tua yang mengoperasikan penambangan sumur tua tanpa ijin resmi dari pemerintah serta beroperasi dengan peralatan alakadarnya yang tentunya tidak memenuhi standar keselamatan dan akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan yang dieksploitasi serta merugikan negara.

Adanya kebijakan mengenai pengusahaan minyak bumi pada sumur tua tersebut, dalam implementasinya pengusahaan mengelola dan memproduksi minyak bumi harus ada kerjasama dengan KUD atau BUMD berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Menanggapi adanya peraturan tersebut, Kabupaten Blora yang merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi penambangan minyak bumi pada sumur tua, memanfaatkan potensi sumur tua yang masih dapat diproduksi yang didukung oleh kebijakan tersebut. Dimana di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data



BUMD PT Blora Patra Energi (BPE) menyebutkan terdapat 595 sumur minyak tua tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Blora.

Salah satu penambangan minyak bumi pada sumur tua yang diproduksi oleh Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Blora adalah penambangan minyak bumi di struktur Banyubang Desa Bangowan yang diusahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

Dimana dalam implementasinya tidak semua jenis koperasi boleh mengelola sumur minyak tua. KUD yang boleh mengelola minyak bumi pada sumur tua adalah koperasi tingkat kecamatan yang wilayah kerjanya mencakup keberadaan lokasi sumur tua. KUD tersebut merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Blora sendiri yang mana berdasarkan kebijakan yang ada KUD berperan sebagai implementor kebijakan.

Berdasarkan data Direktur Jendral Migas, pada tahun 2009 telah diberikan persetujuan pemroduksian minyak bumi pada sumur tua kepada KUD Wargo Tani Makmur di Struktur Banyubang Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sumur tua itu berada di wilayah kerja PT Pertamina EP. Peraturan tentang pengelolaan sumur tua, diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 1 tahun

2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Dalam aturan itu ditetapkan, jangka waktu memproduksi minyak bumi tidak melebihi sisa jangka waktu kontrak kerja sama dan diberikan paling lama 5 tahun serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun. Ditetapkan pula, hasil produksi minyak itu diserahkan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan harus memenuhi mutu dan spesifikasi yang telah disepakati. KKKS



diwajibkan memberikan imbalan jasa berdasarkan perjanjian sebelumnya.

Imbalan itu merupakan bagian biaya operasi KKKS (Kementerian ESDM, 2010).

KUD Wargo Tani Makmur yang telah mengajukan permohonan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua yang berada di wilayah kerja KUD

kepada PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu berhasil mempunyai ijin pengusahaan penambangan pada 24 Maret 2009. Hal tersebut yang mendasari KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora menjadi koperasi

unit desa pertama yang dijadikan sebagai *pilot project* dari adanya kebijakan mengenai pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Dimana dalam pengelolaannya KUD Wargo Tani Makmur ini memanfaatkan tenaga kerja lokal, hal ini dikarenakan agar dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga desa dan dapat mengurangi pengangguran.

Kegiatan pertambangan sumur minyak tua di Kabupaten Blora kini telah mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Adanya pengawasan secara intensif di tiap-tiap lokasi pertambangan, pemberian izin pun tidak begitu saja didapat oleh para penambang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap kerusakan lingkungan yang timbul akibat pertambangan disuatu daerah. Maka dari itu dalam pengelolaan sumur tua di Kabupaten Blora diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua di Kabupaten Blora. Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai upaya pemberian rekomendasi untuk perijinan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua serta pengendalian, pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup



sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Dimana dalam pemberian rekomendasi tersebut terdapat peran dari Balai Pengkajian, Pengawasan, Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral (BP3ESDM) Wilayah Kendeng Selatan meliputi daerah Blora, Rembang, Pati, dan Kedung Tuban. BP3ESDM merupakan unit pelaksana teknis pada dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pengelolaan pada sumur minyak tua di Kabupaten Blora belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar daerah penambangan, sehingga masih rawan terhadap adanya konflik. Selain itu masih terkendala dalam berbagai hal seperti panjangnya proses perijinan, permodalan dan teknologi yang digunakan. Maka dari itu dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua tersebut tidak lepas dari adanya kooordinasi antar aktor-aktor dalam mengimplementasikan kebijakan, yang mana dalam penambangan sumur tua terkait pengelolaan minyak bumi pada sumur tua di struktur Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora ini mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin mengungkap lebih jauh mengenai proses pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua di struktur Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua,



dimana Koperasi Unit Desa Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora menjadi salah satu implementor dalam kebijakan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua (Studi Pada Koperasi Unit Desa Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua di struktur Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yang dikelola oleh KUD Wargo Tani Makmur?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua di struktur Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora oleh KUD Wargo Tani Makmur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis bagaimana proses Implementasi kebijakan pada penambangan minyak bumi pada sumur tua di struktur Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yang dikelola oleh KUD Wargo Tani Makmur.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan penambangan minyak bumi pada sumur tua yang



dilakukan oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian ini terdiri dari kontribusi akademis dan kontribusi praktis sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

a. Bagi Akademisi

Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah pemahaman tentang implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua yang diusahakan oleh Koperasi Unit Desa Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

b. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah implikasi teoritis bagi penulis dan pembaca atau peneliti lain sebagai sumber informasi dalam kajian tentang implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bahan informasi bagi pengambil kebijakan (*policy maker*) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian sejenis.



E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Pembahasan yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing terbagi menjadi sub-sub bab. Garis besar sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan yaitu mengenai latar belakang Implementasi Kebijakan

Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. selanjutnya bab ini juga berisikan rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini disajikan tinjauan teoritis yang digunakan dalam hubungannya dengan pembahasan masalah yang diambil oleh peneliti yang berfungsi untuk memecahkan masalah tersebut. Teori-teori yang digunakan ialah teori administrasi publik, teori kebijakan publik, teori implementasi publik dan teori tentang penambangan minyak bumi pada sumur tua.

BAB III : METODE PENULISAN

Pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang berisikan mengenai jenis



penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data. Sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai implementasi kebijakan penambahan minyak bumi pada sumur tua yang dikelola oleh Koperasi Uni Desa. Data yang diperoleh dari penelitian dihimpun kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan peneliti serta saran. Adapun kesimpulan dan saran yang diajukan peneliti dapat digunakan untuk perbaikan yang dapat dimanfaatkan dimasa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi Publik dalam penyebutannya seringkali disebut juga dengan Administrasi Negara. Namun jika melihat kata publik tersebut, publik memiliki makna yang lebih luas dari negara. Kata publik tidak hanya mencakup lingkup negara saja tapi juga mencakup masyarakat luas dan lingkungannya. Seringkali administrasi publik dikatakan sebagai birokrasi. Untuk dapat memahami lebih jelas mengenai Administrasi Publik dapat dilihat dari pendapat para pakar sebagai berikut.

Mengutip pendapat dari Chander dan Plano yang dikutip oleh Keban (2014:3) bahwa administrasi publik didefinisikan sebagai “Proses dimana sumberdaya dan personel publik yang diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Chander dan Plano menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan “seni dan ilmu yang ditunjukkan untuk mengatur *“public affairs”* dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.



Menurut Nigro & Nigro Nicholas Henry dikutip oleh Keban (2014:6) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik; yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta; dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut pendapat Nicholas Henry dikutip oleh Keban (2014:6) memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kegiatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatur keputusan-keputusan dari kebijakan publik untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan baik bidang organisasi, sumber daya manusia maupun keuangan secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.



2. Fungsi Administrasi Publik

Menurut Luther M. Gullick dikutip oleh Keban (2014:44) dalam karyanya "*Papers on the Science of Administration*" mengatakan bahwa fungsi organik *administration and management* meliputi:

- a. *Planing* (perencanaan)
Proses menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode yang digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi;
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
Penciptaan dari struktur otoritas formal dimana sub bagian kerja dapat diatur, dirumuskan, dan dikoordinasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- c. *Staffing* (pengadaan tenaga kerja)
Keseluruhan fungsi pengangkatan dan training para staff, serta menjaga suasana kerja yang menyenangkan;
- d. *Directing* (pemberian bimbingan)
Suatu tugas yang kontinu dalam pembuatan keputusan dan menyusunnya dalam aturan-aturan dan instruksi-instruksi khusus atau umum, dan melayani sebagai pemimpin organisasi;
- e. *Coordinating* (pengkoordinasian)
Semua kegiatan penting yang menghubungkan-hubungkan berbagai bagian atau unit kerja dalam organisasi;
- f. *Reporting* (pelaporan)
Kegiatan menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi kepada atasannya, termasuk menjaga agar dirinya dan bawahannya tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian dan inspeksi;
- g. *Budgeting* (penganggaran)
Semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, perhitungan, dan pengendalian anggaran.

3. Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik

Ilmu administrasi publik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang sangat luas, hal ini dapat dilihat dari teori-teori yang ada pada proses administrasi publik serta perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat.

Nicholas Henry yang dikutip oleh Keban (2014:8) memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas, yaitu;



- a. Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi
- b. Manajemen publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia
- c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Selanjutnya, Yeremias T. Keban (2014:11) membagi ruang lingkup administrasi publik kedalam beberapa dimensi strategis. Dimensi-dimensi tersebut antara lain:

- a. Dimensi kebijakan
- b. Dimensi organisasi
- c. Dimensi manajemen
- d. Dimensi moral dan etika
- e. Dimensi lingkungan
- f. Dimensi akuntabilitas kerja

Dimensi – dimensi tersebut saling berkaitan dalam mencapai tujuan.

Keban menyatakan bahwa dimensi ini menggambarkan bukti nyata tentang kehadiran dan kegunaan riil dari administrasi negara, salah satunya adalah dimensi kebijakan, dimana dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak pada manusia yang memberikan arahan atau tujuan dari suatu tindakan (Keban, 2014:11).

Beberapa ruang lingkup yang diungkapkan oleh pakar-pakar tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu bagian yang dilakukan oleh administrasi publik. Lebih jelas peneliti melihat dari dimensi-dimensi administrasi publik yang diungkapkan oleh pendapat Yeremias T. Keban. Dari



dimensi- dimensi tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan publik merupakan salah satu dari dimensi strategis. Hal ini memperlihatkan bahwa administrasi publik sudah sampai pada ranah pengambilan keputusan.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara umum suatu kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah. Namun berikut terdapat pengertian kebijakan publik antara lain: Menurut buku Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano dikutip oleh Keban (2014:60), *Public Policy* adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Selanjutnya, menurut Anderson dikutip oleh Wahab (2008:2) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan yaitu “perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang tertentu”. Kebijakan- kebijakan tersebut mempunyai beberapa implikasi.

Pertama, kebijakan publik selalu memiliki tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu. Kedua, kebijakan yang berisi tindakan pemerintah adalah sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan definisi yang diberikan oleh



Dye yang dikutip oleh (Winarno, 2014:15) yang mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*”. Artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan menurut Peterson dikutip oleh Keban (2014:61) berpendapat bahwa Kebijakan publik secara umum dapat dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan cara pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk dapat mengambil suatu keputusan dalam menghadapi dan memecahkan masalah publik. Dimana dalam memutuskan kebijakan publik pemerintah berperan sebagai tokoh utama untuk menentukan apa yang harus dilakukan, maka dari itu kebijakan harus dibuat sesuai dan tepat sasaran.

2. Bentuk Kebijakan Publik

Menurut pendapat Keban (2014:61) menyatakan bahwa pada umumnya, bentuk kebijakan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk antara lain:

- a. Bentuk *regulatory* yaitu mengatur perilaku orang,
- b. Bentuk *redistributive* yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin.



c. Bentuk *distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, dan

d. Bentuk *constituent* yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara.

Pendapat lain mengenai bentuk kebijakan publik yang dijelaskan oleh

Tangkilisan (2003:2) menyatakan bahwa bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Dalam pengimplementasian kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan. Contoh kebijakan yang bersifat makro adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, lebih dikenal sebagai penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk



kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pendapat mengenai bentuk kebijakan publik dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kebijakan publik terdapat berbagai bentuk kebijakan baik dalam bentuk *regulatori*, *redistributif*, *disributif* dan *constituent*. Selain itu bentuk kebijakan dapat berbentuk kebijakan yang formal yang bersifat makro, meso dan mikro. Masing-masing bentuk kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari tujuan dan target suatu program sebagai wujud kongkrit dari suatu kebijakan. Program atau proyek tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan.

3. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik berkenaan dengan proses membuat pilihan-pilihan kebijakan lengkap dengan tahapan-tahapannya, yang secara teoritis dilandasi oleh berbagai faktor atau pertimbangan, dan nampak dalam model-model kebijakan publik. Berikut adalah proses kebijakan yang dilakukan dalam kebijakan publik menurut Keban (2014: 66-79):

a. Tahap tahap kebijakan

Yang meliputi penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan penilaian kebijakan (*policy assessment*).



b. Analisis kebijakan

Proses analisis kebijakan dibedakan atas identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif, dan pengusulan alternatif terbaik untuk diimplementasikan.

c. Implementasi Kebijakan

Berkenaan dengan kegiatan dalam realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

d. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Monitoring dilakukan guna mengawasi jalannya proses implementasi. Dalam monitoring dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara direkam untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Evaluasi digunakan untuk mempelajari tantangan hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar lingkungan politik.

Menurut Thomas R. Dye yang dikutip oleh Widodo (2013:16-17) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)

Identifikasi masalah masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demand*) atas tindakan pemerintah.

b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)



Penyusunan agenda merupakan aktifitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perancangan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.

d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik dan aktivitas agen eksekutif yang berorganisasi.

f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintahan sendiri, konsultan luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Melihat proses kebijakan sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya kebijakan publik adalah serangkaian hal yang tidak sederhana.

Dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan publik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana masalah dirumuskan, agenda kebijakan ditentukan, kebijakan dirumuskan, keputusan kebijakan diambil, kebijaksanaan dilaksanakan, dan kemudian kebijakan dievaluasi. Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji pada implementasi kebijakan dari kegiatan penambangan minyak bumi pada sumur tua.

4. Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Publik

Salah satu pendapat tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan disampaikan oleh D.L. Weiner dan Aidan R. Vining yang dikutip oleh Keban (2014:78), setelah mempelajari berbagai literatur tentang implementasi.

Menurut mereka terdapat tiga faktor umum yang dapat mempengaruhi keberhasilan yaitu :



- a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah diterapkan;
- b. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* yang produktif;
- c. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Sedangkan kegagalan kebijakan publik dibagi menjadi dua kategori yaitu tidak terimplikasinya dan implementasi tidak berhasil. Kebijakan yang tidak terimplikasi artinya bahwa implementasi kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dan yang dimaksud dengan implementasi tidak berhasil yaitu kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun kondisi eksternal tidak mendukung sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil (Wahab 2005:61).

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses (Winarno 2014:147).

Dikutip dari pendapat Ripley dan Franklin dikutip oleh Winarno (2014:148), implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*),



atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Van Meter Van Horn dikutip oleh Wahab (2008:65) mengatakan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang saling bekerjasama. Pelaksanaan kebijakan tersebut ditetapkan terlebih dahulu tindakan apa yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah agar dapat sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model-model implementasi kebijakan dari berbagai ahli antara lain :

a. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Penjelasan mengenai model implementasi kebijakan oleh Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang dikutip oleh Subarsono (2013:94-99), di mana dijelaskan bahwa di dalam model implementasi kebijakan ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

- 1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya :



- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya :
- a) Kejelasan isi kebijakan;
 - b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teorius;
 - c) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut;
 - d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
 - g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- 3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya
- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
 - c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*);
 - d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

b. Model Van Meter dan Van Horn

Teori dari Van Meter dan Van Horn ini berawal dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn, (1975:463) dikutip dalam Subarsono (2013:99-101) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :



1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

2) Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3) Hubungan antar Organisasi

Dalam berbagai program, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4) Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program. Sejahterama kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu

- a) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
- c) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

c. Model George C. Edward III

George C. Edward III mengembangkan empat faktor atau variabel dari implementasi kebijakan yang merupakan kegiatan kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.



Berikut adalah empat faktor implementasi kebijakan model George Edward III yang dikutip dalam Subarsono (90-92, 2013).

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau *Standard Operating Procedures* atau (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



D. Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua

1. Pengertian Pertambangan dan Minyak Bumi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyeledikian umum, eksploitasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih. (Badan Pusat Statistik, 2018).

Minyak bumi atau *petroleum* dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada dilapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi ini diambil dari sumur minyak di pertambangan-pertambangan minyak yang didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, serta berbagai macam studi lainnya (wikipedia.org)



Menurut Darmono (2009:8-9) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi adalah zat cair dalam berbagai tingkat kekentalan dan warna, mulai dari yang sangat kental dan berwarna gelap sampai yang encer dan berwarna coklat muda agak bening, didalam minyak bumi terdapat senyawa kimia yang terdiri dari unsur hidrogen, karbon dan terdapat unsur lainnya seperti belerang dan nitrogen dengan jumlah yang sangat beragam.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan minyak bumi adalah kegiatan pengambilan bahan galian berharga yang berupa zat cair yang berada jauh didalam bumi yang mempunyai kandungan senyawa kimia tertentu dan mempunyai nilai ekonomis.

Pertambangan dilakukan melalui beberapa tahapan seperti penyelidikan umum, eksploitasi studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

2. Kebijakan Perizinan Usaha Pertambangan

Izin usaha dan atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan izin usaha dan atau kegiatan (UU No. 32 Tahun 2009).

Perizinan usaha pertambangan ini meliputi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan adanya otonomi daerah, perizinan pengelolaan sumberdaya alam tambang saat ini berada di bawah wewenang pemerintah daerah.

Menurut pendapat Salim dalam Zulkifli (2014:36-37) menyatakan bahwa apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang



diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak *production sharing*. Dalam hal ini perusahaan yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari:

- a. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
- b. Perusahaan negara;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
- e. Koperasi;
- f. Badan atau perseorangan swasta;
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi atau badan/perorangan swasta;
- h. Pertambangan rakyat

Zulkifli (2014:37-38) menyatakan bahwa yang berwenang dalam penerbitan kuasa pertambangan ini adalah Menteri, Gubernur, dan Walikota/Bupati. Kuasa pertambangan merupakan kuasa yang diberikan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang kepada pihak-pihak yang akan melakukan usaha penambangan. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.



IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara.

3. Tahapan Pertambangan

Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Berikut adalah beberapa tahapan pertambangan menurut Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2004:

- a. Penyelidikan umum, adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- b. Eksplorasi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- c. Studi kelayakan, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- d. Operasi produksi, adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- e. Konstruksi, adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- f. Penambangan, adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya.



- g. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- h. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- i. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- j. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- k. Kegiatan pascatambang salah satunya adalah reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- l. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih tingkat kehidupannya.

4. Asas Pertambangan

Berdasarkan pada Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Berikut adalah penjelasan dari asas-asas pertambangan :

a. Manfaat, Keadilan, Dan Keseimbangan;

1) Asas Manfaat

Merupakan asas dimana dalam pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas manfaat merupakan salah satu tujuan dari ilmu hukum, bahwa baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat pada setiap subjek hukum atau dengan kata lain mampu memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar dari masyarakat.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas dimana dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan



mineral dan batubara, juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3) Asas Keseimbangan

Merupakan suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara.

b. Keberpihakan Kepada Kepentingan Bangsa

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau mendukung kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Asas ini berkaitan dengan asas oportunitas yaitu lebih mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan golongan.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas;

1) Asas partisipatif

Bahwa dalam pelaksanaan pertambangan, perlu adanya peran serta atau partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang berada di lingkup wilayah pertambangan dalam kegiatan tambang.

2) Asas transparansi

Bahwa dalam kegiatan pertambangan harus dilaksanakan secara terbuka. Setiap informasi harus disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Baik tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja dan lainnya.

3) Asas akuntabilitas

Setiap kegiatan pertambangan harus dapat dibertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

d. Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan

Merupakan asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang.



5. Pengertian Sumur Tua

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor. Dalam kegiatan tersebut masing-masing KUD atau BUMD akan memproduksi minyak bumi dari sumur-sumur tua untuk selanjutnya menyerahkan kepada PT Pertamina EP di titik penyerahan sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan. PT Pertamina EP memberikan imbalan jasa yang didasarkan atas jumlah aktual minyak bumi yang diserahkan. Imbalan jasa tersebut merupakan pengganti biaya operasi memproduksi minyak bumi dan pengusahaan sumur tua yang merupakan kesepakatan PT Pertamina EP dengan masing-masing BUMD.

Dalam kegiatan pengelolaan sumur tua PT Pertamina EP mewajibkan pihak KUD untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan HSE (*Health Safety and Environment*) yang di tuangkan dalam CSMS (*Contractor Safety Management System*) Pertamina EP seperti yang diatur dalam pedoman Tata Kerja No. 023/PTK/III/2009 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

6. Pengusahaan Sumur Tua

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada



Sumur Tua, untuk mengusahakan sumur tua harus mengajukan permohonan kepada kontraktor dengan tembusan menteri, Dirjen Migas, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis. Permohonan tersebut didasarkan atas rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dan disetujui oleh pemerintah provinsi. Untuk dokumen administratif meliputi:

- a) Akte pendirian KUD/BUMD dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b) Surat Tanda Daftar Perusahaan.
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d) Surat Keterangan Domisili.
- e) Rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota dan disetujui oleh pemerintah provinsi setempat.
- f) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan perundang-undangan

Sedangkan untuk dokumen teknis meliputi:

- a) Peta lokasi sumur tua yang dimohonkan.
- b) Jumlah sumur yang dimohonkan.
- c) Rencana memproduksi minyak bumi termasuk usulan imbalan jasa.
- d) Rencana program keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk penanggung jawab pelaksanaan.
- e) Kemampuan keuangan



Terdapat jangka waktu perjanjian untuk memproduksi minyak bumi paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 tahun.

Perjanjian memproduksi minyak bumi ini paling sedikit memuat :

- a) Jumlah dan lokasi sumur tua yang akan diproduksi.
- b) Imbalan jasa memproduksi minyak bumi.
- c) Jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran perjanjian.
- d) Alat bantu mekanik dan teknologi yang digunakan.
- e) Tenaga kerja.
- f) Mutu dan spesifikasi minyak bumi.
- g) Titik penyerahan minyak bumi.
- h) Aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- i) Penyelesaian perselisihan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada di lapangan secara sistematis. Tujuan dari metode penelitian deskriptif kualitatif sejalan dengan rumusan masalah yang ada. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk mengkaji permasalahan dan menjawab tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasam pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2016:6). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Menurut (Arikunto, 2013:3) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan tertentu.

Jadi, penelitin kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena, peristiwa atau aktivitas sosial menggunakan metode



penggambaran secara rinci fakta-fakta temuan yang ada di lapangan dan nantinya akan dianalisis menggunakan teori yang sesuai. Alasan dipilihnya jenis penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana proses implementasi kebijakan yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral No 01 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Agar suatu penelitian tidak bersifat meluas maka diperlukan fokus penelitian. Sugiyono (2011:207) menyatakan dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala dari suatu objek bersifat holistik (menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Perlunya fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dalam suatu penelitian yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Maka dari itu, penulis membuat fokus penelitian ini terletak pada pengimplementasian suatu kebijakan dalam pengelolaan penambangan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora. Hal ini mengacu pada beberapa peraturan dan kebijakan penambangan Minyak Bumi pada sumur tua yang sudah ada. Maka disini penulis



membuat batasan fokus berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas, adalah:

1. Proses Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur

Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, menurut teori implementasi Van Horn Van Meter (1975) meliputi :

- a. Standar dan Sasaran Kebijakan
- b. Sumber Daya
- c. Aktor atau organisasi yang terlibat
- d. Koordinasi antar organisasi
- e. Kondisi sosial dan ekonomi
- f. Dampak Kebijakan

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora meliputi:

a. Faktor Pendukung

Yaitu faktor-faktor yang mendukung untuk terimplementasinya Kebijakan Tentang Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora meliputi:

1. Kejelasan kebijakan itu sendiri
2. Sumber daya yang mendukung



b. Faktor Penghambat

Yaitu faktor-faktor yang menghambat untuk terimplementasinya Kebijakan Tentang Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora meliputi:

1. Minimnya data dukung
2. Proses perijinan yang panjang
3. Teknologi yang digunakan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Sedangkan situs penelitian yang merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang valid dan akurat. Situs penelitian yang dipilih peneliti adalah KUD Wargo Tani Makmur dan Desa Bangowan. Pertimbangan peneliti untuk menetapkan pemilihan lokasi dan situs penelitian tersebut adalah:

1. Kabupaten Blora merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam pertambangan minyak bumi pada sumur tua.
2. KUD Wargo Tani Makmur merupakan salah satu KUD di Kabupaten Blora yang menjadi *pilot project* dalam penambangan minyak bumi pada sumur tua dengan lokasi penambangan berada di Desa Bangowan.



3. Belum ada penelitian di Kabupaten Blora yang mengkaji masalah implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua yang dikelola oleh KUD Wargo Tani Makmur.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2016:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Pengertian data primer menurut Arikunto (2013:172) adalah “data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain”. Maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yang memakai data primer. Data yang diperoleh adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya melalui informan yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi observasi (pengamatan) serta wawancara mendalam (*in depth interview*). Sedangkan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, yang merupakan salah satu metode dalam pengambilan sampel dari suatu populasi. Menurut Sugiyono (85:2011) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.



Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Sumber data primer yang digunakan oleh penulis diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak yang berkaitan, antara lain: Bapak Yusuf selaku manager KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken, Bapak Adi Sucipto selaku Direktur Balai Pengkajian, Pengawasan, Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral (BP3ESDM) Wilayah Kendeng Selatan, Bapak Yusmanto selaku staf ahli BP3ESDM, Bapak Sudarto selaku Kepala Desa Bangowan, Bapak Sukarlan selaku Kepala Dukuh Banyubang, Bapak Romi selaku penambang dan masyarakat Desa Bangowan.

2. Data Sekunder

Pengertian data sekunder menurut (Arikunto 2013:172) adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kesua, biasanya diperoleh melalui instansi yang bergerak dibidang pengumpulan data seperti Badan Pusat Statistik dan lain-lain. Data sekunder yang diperoleh peneliti diantaranya

- a). Dokumen: Sebagai sumber data pendukung, yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk dapat memberikan gambaran konteks penelitian yang baik. Informasi bisa didapatkan dengan mengamati sendiri secara langsung, menyimak

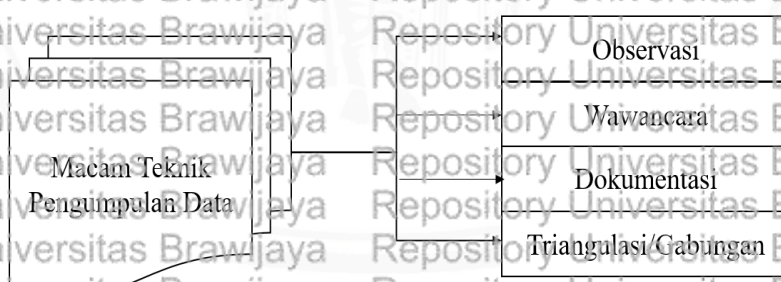


media masa, menelaah dan membaca jurnal dan laporan penelitian dan juga dapat melakukan percakapan yang intens dengan orang tertentu dalam suatu tindakan sosial tertentu, Bungin (2013:40).

- b) Buku-buku: meliputi buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku mengenai administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dan buku mengenai penambangan minyak bumi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data (Sugiyono 2011:224). Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:



Gambar 3. Macam Teknik Pengumpulan Data

Sumber: Sugiyono (2011:225)

1. Observasi atau Pengamatan

Pengamatan atau observasi ini memungkinkan pengamat untuk melihat fenomena yang diteliti. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang



dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data. Observasi memungkinkan pembentukan pengarahannya yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek lain.

2. Wawancara

Merupakan percakapan antara dua pihak dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal wawancara peneliti selaku pewawancara harus menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada terwawancara secara sistematis dan jelas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mengambil data dari dokumen, arsip, dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Penggunaan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk pengumpulan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen tertulis (peraturan, undang-undang, surat keputusan, dan ketentuan lain) sebagai bahan referensi dan komparasi.

4. Triangulasi

Teknik pengumpulan data triangulasi menurut Sugiyono (2011:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah diperoleh. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, seperti menggunakan metode observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mendapatkan sumber



data yang sama. Sedangkan triangulasi sumber ialah, mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam suatu penelitian, alat pengambil data atau instrumen menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan dan kualitas itu menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan dan kualitas itu menentukan kualitas penelitiannya, maka dari itu dalam suatu penelitian instrumen yang digunakan atau dibuat harus cermat. Instrumen penelitian menunjang peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang dilakukan melalui, antara lain yaitu:

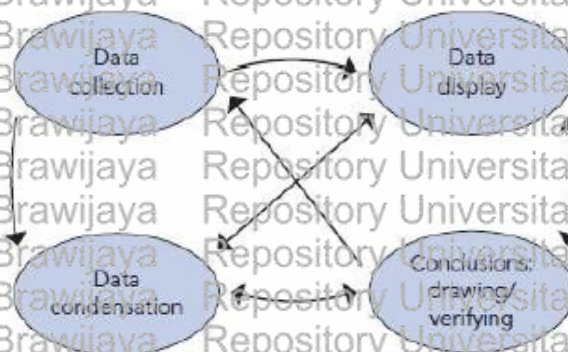
1. Peneliti sendiri, sebagai salah satu pengaruh utama dalam proses wawancara dan analisa data. Dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
2. Pedoman wawancara menurut Arikunto (2013:198), adalah sebuah dialog yang digunakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pedoman wawancara digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan peneliti tetap terarah dan tetap menjaga relevansi terhadap masalah yang diteliti.
3. Observasi, menurut Arikunto (2013:199) adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra.



4. Dokumentasi menurut Arikunto (2013:201) yaitu berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.
5. Perangkat penunjang, seperti buku catatan yang berisi berbagai informasi aktual yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, alat dokumentasi seperti kamera, *Field Note* (Buku Catatan), serta alat perekam suara untuk memudahkan dalam melakukan pengolahan data.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu penyelenggaraan ke dalam suatu pola atau bentuk yang tidak mudah untuk diinterpretasikan. Pada penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisa secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka analisa data diinterpretasikan dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata atau kalimat. Sehingga analisa data pada penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Analisis data dalam penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dari lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan model interaktif. Dimana menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014), analisis terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data (data collection), kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 4. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14).

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Data collection yaitu kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan dalam menentukan tujuan dari penelitian sesuai dengan jenis dan sifat data.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses pengolahan data ke dalam sejumlah kategori yang sesuai, yang akhirnya akan memudahkan dalam rangka menurunkan, menyimpulkan dan menginterpretasikan data. Selain itu, penyajian data juga berfungsi sebagai daftar yang bisa secara cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini memuat berupa gambaran umum dari pelaksanaan kegiatan penambangan secara baik dan benar serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar areal tambang.

3. Kondensasi (*Data Condensation*)

Merujuk pada proses pemilihan menyederhanakan, memfokuskan, dan mengabstrakkan secara umum adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan



tindakan. Bentuk penyajiannya dapat berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Merupakan tahapan terakhir dalam analisis data interaktif. Yaitu data yang telah dikumpulkan, kemudian direduksi untuk memilih-milih data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk mempertajam agar lebih terarah, kemudian dilakukan kondensasi data untuk menyederhanakan sehingga dapat ditarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Kabupaten Blora

Blora merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora berasal dari kata “Belor” yang berarti lumpur, kemudian diucapkan oleh masyarakat Jawa “Mbelor” dan sekarang menjadi Blora.

Menurut bahasa, Blora berasal dari dua kata, yaitu “Wai” yang artinya air dan “Lorah” yang artinya tanah rendah atau jurang. Seiring perkembangan zaman membuat sebutan Wailorah berganti menjadi Bailorah kemudian menjadi Balora dan terakhir menjadi Blora. Jadi, nama Blora berarti tanah rendah berair, dimana pengertian ini dekat sekali dengan pengertian tanah lumpur.

Zaman dahulu tepatnya pada abad XVI, Blora merupakan bagian dari pemerintahan Kadipaten Jipang di bawah pemerintahan Demak. Daerah kekuasaan Jipang meliputi Lasem, Blora, Pati dan Jipang. Blora termasuk bagian dari wilayah Mataram bagian timur dan dikenal dengan sebutan Bang Wetan. Pada masa pemerintahan Paku Buwana I pada tahun 1704-1719, Blora diberikan kepada putra Pangeran Bintar yang diberi gelar Adipati. Kemudian pada masa Mataram dipimpin oleh Amangkurat IV tahun 1717-1727 M. Saat terjadi pemberontakan



oleh Mas Sahid dan Mangku Bumi ketika Kerajaan Mataram dipimpin oleh Paku Buwana II, mereka mampu menguasai Sukawati, Demak, Grobogan, Yogyakarta dan Blora. Mangku Bumi pada saat itu diangkat menjadi Raja di Yogyakarta pada tanggal 1 Sura tahun Alib 1675 atau 11 Desember 1749 oleh rakyatnya, serta diangkat pula pejabat-pejabat lain seperti Wilatikta sebagai Bupati Blora. Pada tahun 1755 atau dikenal sebagai Palihan Negari atas dasar perang Mangku Bumi, disitu terjadi perjanjian Giyanti. Perjanjian itu menyebutkan bahwa Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Yogyakarta dibawah pimpinan Sultan Hamengku Buwana I dan Kerajaan Surakarta di bawah pimpinan Paku Buwana I Blora menjadi Kasunanan Surakarta di daerah Mancanegara Timur, namun Bupati Wilatikta tidak setuju dan kemudian Wilatikta mundur dari jabatannya.

Pada masa penjajahan, terdapat Gerakan Samin oleh rakyat Blora yang dipelopori oleh para petani sebagai gerakan petani antikolonial dengan menggunakan metode proses pasif yaitu suatu gerakan yang tidak merupakan pemberontakan radikal bersenjata. Gerakan ini dilatarbelakangi atas memburuknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan yang terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Indikator penyebab adanya pemberontakan untuk menentang kolonial penjajah antara lain indikator-indikator yang mempunyai hubungan langsung dengan gerakan protes petani di daerah Blora seperti, perubahan pola pemakaian tanah komunal pembatasan dan pengawasan oleh Belanda mengenai penggunaan hasil hutan. Gerakan ini

mempunyai corak milinarisme yakni gerakan yang menentang ketidakadilan dan mengharapkan zaman emas yang makmur.

b. Visi dan Misi Kabupaten Blora

Visi: “Terwujudnya masyarakat blora yang lebih sejahtera dan bermartabat”

Misi:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari KKN, dan demokratis melalui reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, ramah lingkungan dan berkesinambungan;
- 3) Meningkatkan iklim yang kondusif dan bekerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan untuk penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha melalui investasi yang tepat sasaran;
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan kearifan lokal;
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;



6) Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang perpinhak pada masyarakat miskin (*pro poor*), *pro job*, *pro growth*, *pro environment* dan *pro gender*;

7) Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia (HAM).

c. Keadaan Geografis



Gambar 5. Peta Kabupaten Blora
Sumber: sejarah negara.com

Secara geografis Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah terletak di antara $111^{\circ} 016'$ sampai dengan $111^{\circ} 338'$ Bujur Timur dan di antara $6^{\circ} 582'$ sampai dengan $7^{\circ} 248'$ Lintang Selatan dengan batas – batas wilayah :

Utara : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati

Timur : Kabupaten Bojonegara Provinsi Jawa Timur

Selatan : Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

Barat : Kabupaten Grobogan

Kabupaten Blora mempunyai luas wilayah 1820,59 km² atau 182.058,798 hektar atau sekitar 5,5 persen luas wilayah Propinsi Jawa Tengah yang terdiri atas lahan sawah seluas 45.948,191 hektar dan sisanya lahan bukan sawah sebesar 74,77 persen yang terdiri dari 49,66 persen hutan dengan luas wilayah 90.416,52 hektar yang merupakan hutan terluas dan merupakan komoditi unggulan. 14,38 persen tegalan dengan luas wilayah 26.315,34 hektar dan 10,73 persen lainnya. Kabupaten Blora merupakan wilayah yang terdiri dari dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian 20-280 meter diatas permukaan laut. Bagian utara merupakan kawasan perbukitan rangkaian dari pegunungan kapur utara. Bagian selatan berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan Jawa Timur.

d. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adanya jumlah penduduk yang besar pada suatu daerah dan diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat mendukung pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila kualitas sumber daya manusianya masih rendah maka akan menjadi penghambat dalam mengerjakan pembangunan. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Blora 2016 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jati	22.737	23.505	46.242
Randublatung	37.264	37.416	38.547
Kradenan	19.784	19.864	20.030
Kedungtuban	27.427	27.539	28.257
Cepu	36.319	37.528	73.847
Sambong	12.535	12.586	12.992
Jiken	19.225	19.711	38.936
Bogorejo	11.821	11.869	12.271
Jepon	30.315	31.147	61.462
Blora	46.220	48.080	94.300
Banjarejo	28.896	29.014	29.629
Tunjungan	22.879	22.972	23.746
Japah	16.867	17.552	34.419
Ngawen	28.449	28.565	29.017
Kunduran	31.191	31.318	32.375
Todanan	28.167	28.282	30.078
Jumlah	421.108	434.465	855.573

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Blora, 2017.

Data diatas menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2016. Kabupaten Blora mempunyai 16 Kecamatan . Laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 tercatat sebesar 0,41 persen. Data kependudukan pada tahun 2016 mencatat tingkat kepadatan penduduk sebesar 470 jiwa/km² dari tahun 2015 yaitu sebesar 468 km². Tercatat sebanyak 855.573 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 421.108 jiwa dan penduduk perempuan 434.465 jiwa dengan sex ratio 96,93% yang berarti dalam 100 jiwa penduduk perempuan terdapat sebanyak 96-97 jiwa penduduk laki-laki.



2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Gambaran Umum Desa Bangowan

1) Kondisi Geografis

Desa Bangowan merupakan daerah yang memiliki luas wilayah 605.663 ha, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 37 m. Jarak Desa Bangowan dari pusat pemerintahan Kecamatan 11 Km, jarak dari pusat pemerintahan Kota atau Kabupaten 23 Km. Adapun batas desa yang membatasi Desa Bangowan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Bogorejo

Sebelah Selatan : Desa Singonegoro

Sebelah Barat : Desa Bogorejo

Sebelah Timur : Desa Gembol

2) Aspek Demografi

Desa Bangowan merupakan daerah dilakukannya kegiatan penambangan minyak bumi dimana di desa tersebut terdapat titik sumur minyak tua yang diusahakan yaitu tepatnya di Dukuh Banyubang. Desa Bangoan mempunyai luas wilayah 605.663 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 berjumlah 1.624 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki dengan jumlah 782 jiwa serta penduduk perempuan berjumlah 842 jiwa. Sebagai mana tertera pada tabel berikut :



Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Bangowan Berdasarkan Kelompok Umur

No	Keterangan	L	P	Jumlah
1	0-4	44	47	91
2	5-9	37	48	85
3	10-14	45	60	105
4	15-19	68	65	133
5	20-24	47	61	108
6	25-29	59	48	107
7	30-34	60	56	116
8	35-39	55	81	136
9	40-44	71	62	133
10	45-49	63	67	130
11	50-54	59	73	132
12	55-59	70	47	117
13	60-64	45	43	88
14	65-69	25	27	52
15	70-74	12	16	28
16	75- keatas	22	41	63
	Jumlah Total	782	842	1.624

Sumber: Data Monograf Desa Bangowan, 2018.

Data diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Bangowan yang berusia sangat produktif menurut Badan Pusat Statistik yaitu pada rentan usia 15 - 49 adalah berjumlah 863 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir 50% penduduk Desa Bangowan berkategori produktif. Kemudian dalam hal pendidikan penduduk pada Desa Bangowan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

No	Keterangan	L	P	Jumlah
1	Tidak/ blm sekolah	169	240	409
2	Belum tamat SD/Sederajat	23	21	44
3	Tamat SD/Sederajat	404	448	852
4	SLTP/Sederajat	120	107	227
5	SLTA/Sederajat	61	23	84
6	Akademi/Diploma III/S.Muda	2	0	2
7	Diploma IV/Strata I	3	3	6
	Jumlah Total	782	842	1624

Sumber: Data Monograf Desa Bangowan, 2018.



Data mengenai pendidikan akhir pada penduduk Desa Bangowan diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bangowan ini mayoritas berpendidikan dengan lulusan tamat sekolah dasar atau sederajat yaitu dengan jumlah 852 orang. Selanjutnya yang tidak sekolah atau belum sekolah berjumlah 409 orang dan tingkat pendidikan akhir SMP berjumlah 227 orang. Disini peneliti menyimpulkan bahwa dalam tingkat pendidikan akhir dari penduduk Desa Bangowan Kecamatan Jiken ini masih rendah dan tidak terdistribusi secara merata.

3) Aspek Ekonomi

Aspek perekonomian di Desa Bangoan sangat dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor dominan yang mendukung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor yang paling dominan adalah pada sektor pertanian. Data mengenai mata pencaharian pokok penduduk Desa Bangowan secara umum disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Statistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Belum/tidak bekerja	385 orang	23,7 %
2	Mengurus rumah tangga	116 orang	7,14 %
3	Pelajar/mahasiswa	74 orang	4,55 %
4	Pensiunan	3 orang	0,18 %
5	Pegawai Negeri Sipil	3 orang	0,18 %
6	Tentara Nasional Indonesia	3 orang	0,18 %
7	Kepolisian RI	1 orang	0,06 %
8	Pedagangan	1 orang	0,06 %
9	Petani/Pekebun	777 orang	47,8 %
10	Karyawan Swasta	150 orang	9,23 %
11	Karyawan BUMN	1 orang	0,06 %
12	Buruh harian lepas	2 orang	0,12 %
13	Pembantu rumah tangga	2 orang	0,12 %
14	Guru	1 orang	0,06 %

Lanjutan



Dilanjutkan

15	Perangkat desa	5 orang	0,30 %
16	Sopir	1 orang	0,06 %
17	Kepala desa	1 orang	0,06 %
18	Wiraswasta	98 orang	6,03 %
	Jumlah total	1.624 orang	100 %

Sumber: Data Monograf Desa Bangowan, 2018.

Tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Bangowan bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun yaitu sebanyak 777 orang atau 47,8 % dari jumlah total penduduk yang ada. Kemudian yang bekerja sebagai karyawan swasta sebanyak 150 orang atau 9,23%. Pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 98 orang atau 6,03%. Selanjutnya pensiunan, TNI dan PNS masing-masing terdapat 3 orang atau 0,18 %. Sedangkan yang belum bekerja atau tidak bekerja sebanyak 385 orang atau 23,7 % dari jumlah penduduk di Desa Bangowan

b) Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken

a. Sejarah KUD Wargo Tani Makmur

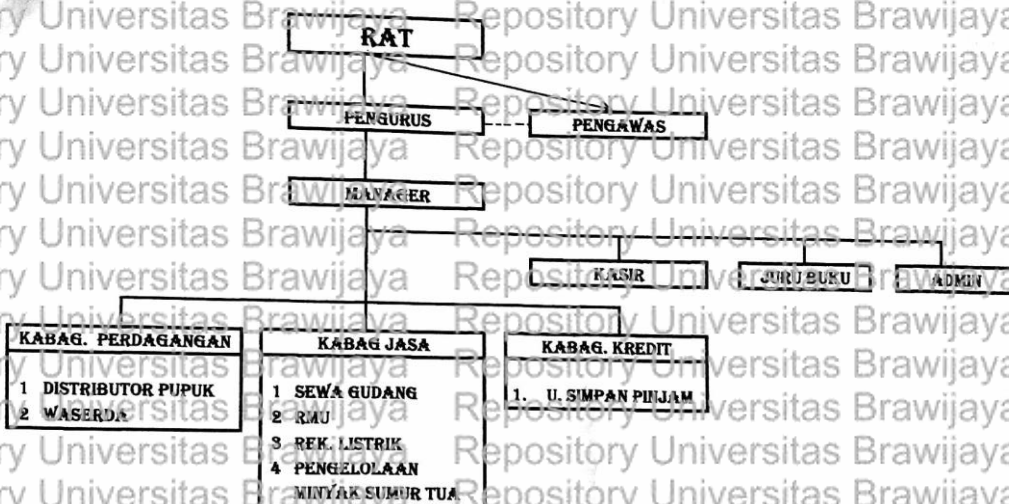


Gambar 6. KUD Wargo Tani Makmur

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018.

Koperasi Unit Desa Wargo Tani Makmur berdiri atas adanya perkumpulan koperasi yang didirikan atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 19 maret 1973 yang selanjutnya dalam anggaran dasar disebut sebagai koperasi. (Bab I pasal 1 ayat 1 Akte Pendirian / AD). Dengan mendapat pengesahan dari Pemerintah dalam bentuk Akta Pendirian KUD “Wargo Tani Makmur” dengan badan hukum nomor : 8732/BH/VI/1975 tanggal 8 Januari 1975. Koperasi berkedudukan di Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Daerah Kerja Koperasi ini meliputi Wilayah Kecamatan (Bab I pasal 1 ayat 3 Akte Pendirian AD).

b. Struktur Organisasi



Gambar 7. Struktur organisasi KUD wargo tani makmur

Sumber: KUD wargo tani makmur, 2018.

Struktur organisasi KUD wargo tani makmur yang ditunjukkan pada gambar 7 menunjukkan bahwa di dalam KUD terdapat Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai tingkat tertinggi dimana didalam RAT tersebut dibawah oleh pengurus dan pengawas. Dibawah pengurus, terdapat manager yang mengatur



dan membawahi seluruh elemen lain seperti kasir, juru buku, admin, bahkan hingga ke kepala bagian perdagangan, kepala bagian jasa dan kepala bagian kredit yang juga mempunyai beberapa unit dan fokus tersendiri.

c. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan kedepan dari sebuah organisasi mengenai tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dan apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misi merupakan sebuah tindakan atau bentuk realisasi dari visi yang ada. Adapun visi dan misi dari Koperasi Unit Desa Wargo Tani Makmur yaitu :

Visi : Pada tahun 2022 KUD menjadi penampung dan pemasar produk pertanian anggota.

Misi:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Anggota dan Pengelola
- 2) Menggunakan IT Terkini dan Data Terpadu
- 3) Membuat Produk Pertanian Organik

d. Program Kerja Koperasi Unit Desa Wargo Tani Makmur

Koperasi Unit Desa Wargo Tani Makmur bergerak di berbagai bidang usaha, jenis-jenis usaha yang terdapat di KUD Wargo Tani Makmur antara lain:

- 1) Pelistrikan
- 2) Distributor Pupuk
- 3) Sewa Gudang



- 4) R.M.U (Rice Milling Unit) Usaha Penggilingan Padi
- 5) Pengelolaan Minyak Sumur Tua
- 6) Waserda
- 7) Simpan Pinjam

Beberapa program kerja diatas, pengusaha pengelolaan minyak bumi pada sumur tua merupakan salah satu program kerja yang diusahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken yang berlokasi di Dukuh Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken. KUD Wargo Tani Makmur dalam kegiatannya wajib untuk mengawasi operasional kegiatan penambangan di struktur Banyubang. KUD juga membuat laporan tentang kegiatan pengelolaan sumur tua yang kemudian dilaporkan kepada PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu dan Instansi terkait.

e. **Legitimasi Keterlibatan KUD Wargo Tani Makmur di Bidang Pertambangan**

KUD wargo tani makmur mempunyai wewenang sebagai pemegang ijin sekaligus pengelola dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral No 01 tahun 2008 tentang pedoman pengusaha penambangan minyak bumi pada sumur tua. Atas dasar tersebut PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset 4 Field Cepu menjalin kerja sama dengan KUD untuk memproduksi minyak bumi pada sumur tua. Pertamina EP bekerja sama dengan KUD Wargo Tani Makmur untuk dijadikan sebagai pilot project pada tanggal 24 Maret tahun 2009 dalam mengeksplorasi 24 sumur di Dukuh Banyubang, Kecamatan Jiken, Kabupaten



Blora, Jawa Tengah. Saat ini KUD Wargo Tani Makmur sudah memiliki ijin untuk mengusahakan beberapa sumur tua di berbagai struktur antara lain yaitu :

1) Struktur Banyubang: berlokasi di Desa Bangoan Kecamatan Jiken dengan jumlah total sumur tua yaitu 24 titik sumur.

2) Struktur Tambi dan Nanas: berlokasi di Desa Nanas dan Desa Tambi Kecamatan Jiken, dengan jumlah sumur tua yaitu 14 titik sumur.

f. Partisipasi Masyarakat

Adanya penambangan minyak bumi pada sumur tua di Dukuh Banyubang Kecamatan Jiken tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat sekitar yang merupakan warga lokal yang berada pada wilayah penambangan. KUD Wargo Tani Makmur berkeinginan dengan adanya aktivitas penambangan ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat khususnya di Desa Bangowan Kecamatan Jiken. Hal ini membuat KUD Wargo Tani Makmur dan pihak swasta sebagai mitra kerja berkoordinasi untuk dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal yang ada di sebagai tenaga kerja non skill.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik oleh para implementor, ialah kebijakan yang mempunyai kejelasan tujuan yang mengatur agar dapat terarah. Mengenai penambangan minyak bumi pada sumur tua yang di



usahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur (WATAMA) Kecamatan Jiken Kabupaten Blora ini mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 01 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Hal tersebut diungkap oleh Bapak Yusuf selaku manager KUD Wargo Tani Makmur (WATAMA) sebagai berikut

“Mengenai kebijakan, pengusahaan minyak pada sumur tua ini kan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2008. Saya rasa..jelas sasaran kebijakan ini adalah kepada KUD atau BUMD dan Kontraktor yang dapat mengusahakan sumur minyak tua untuk mengoptimalkan sumur tua yang ada di wilayah kerja kita agar dapat diproduksi kembali untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Memang tidak semua KUD dapat mengusahan sumur minyak tua, hanya KUD-KUD yang wilayah kerjanya mencakup keberadaan lokasi sumur tua saja. Adanya peraturan tersebut kita sebagai KUD yang kebetulan saja wilayah kerjanya mencakup daerah keberadaan sumur tua ini yaa..begitu ada kesempatan ya mengapa tidak untuk diambil kan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat juga. Jadi saya langsung mengusahakannya dengan memulai mengurus perijinan-perijinan dari tingkat kabupaten sampai ke pusat saya berjuang untuk mendapatkan ijin ini dan alhamdulillah KUD Watama ini bernasil mendapatkan kontrak pengusahaan sejak 24 maret 2009. (Hasil wawancara tanggal 16 Februari 2018 jam 10.20 di ruang kantor KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken)”

Pernyataan di atas menyatakan bahwa standar kebijakan dari adanya penambangan minyak bumi pada sumur tua yang diusahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken di Struktur Dukuh Banyubang ini berlandaskan dari adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) No 01 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua, yang diusahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken yang bekerjasama dengan PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu sejak tanggal 24 Maret 2009. Selanjutnya



terkait standar kebijakan dan sasaran kebijakan selanjutnya peneliti mewawancarai Bapak Yusmanto selaku staf ahli BP3ESDM Wilayah Kendeng Selatan sebagai berikut:

“Mengenai kebijakan untuk mengenai peraturan kebijakan itu kan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Daerah kan hanya sebagai rekomendasi dan keputusan tetap berada di Kementerian ESDM. Jadi prosesnya gini, yang diijinkan mengelola sumur tua ini kan KUD dan BUMD yang diwilayahnya itu ada potensi sumur Minyak tua yang pada prinsipnya sumur yang boleh diijinkan yang pertama adalah sumur itu sudah tidak produktif yang kedua sudah ditinggalkan yang hal ini sudah ada dalam Peraturan Menteri ESDM 01 tahun 2008.” (hasil wawancara tanggal 7 Maret 2018 Jam 11.00 di Ruang Kantor BP3ESDM Kendeng Selatan)

Pendapat dari bapak Yusmanto tersebut menyatakan bahwa penambangan minyak bumi pada sumur tua pada dasarnya mengacu pada produk hukum Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Dimana dalam peraturan tersebut diatur bahwa Kabupaten sebagai pemberi rekomendasi untuk kegiatan penambangan. Sepahaman dengan Bapak Yusuf dan Bapak Yusmanto mengenai sasaran kebijakan hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Adi Santosa selaku Direktur Bidang ESDM BP3ESDM :

“Ya Selain adanya Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 ini kan kita BP3ESDM yang bertugas untuk mempermudah tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Kita juga melakukan pembinaan teknis sesuai dengan standar operasional prosedur, dimana kita mempunyai acuan yaitu mengacu dalam tata cara teknis pengelolaan sumur tua PTK No 23 Tahun 2009.” (hasil wawancara tanggal 13 Maret 2018 Jam 10.00 di Ruang Kantor BP3ESDM Kendeng Selatan)



Pemaparan dari Manager KUD Wargo Tani Makmur, Staf Ahli dan Direktur Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Balai Pengkajian, Pengawasan, Pengendalian, Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan tersebut jelas bahwa standar penambangan minyak bumi pada sumur tua ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Peraturan Menteri ESDM tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi sasaran dalam pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua ialah Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta kontraktor yang wilayah kerjanya berada di wilayah keberadaan sumur minyak tua, untuk dapat mengoptimalkan produksi minyak bumi pada sumur tua yang wilayah kerjanya terdapat sumur tua. Dalam hal ini KUD Watama sebagai salah satu KUD di Kabupaten Blora yang mengusahakan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Selain itu, pertambangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua tersebut dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya.

Kegiatan pengelolaan sumur tua inipun didukung pula dengan adanya standar operasional prosedur yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) NO 23 Tahun 2009 BPMIGAS tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. PTK ini yang menjadi pedoman bagi SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Keras (KKKS) dalam menangani permohonan dari



KUD yang ingin mengusahakan penambangan minyak bumi pada sumur tua di lokasi wilayah kerjanya.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam terwujudnya implementasi kebijakan. Dukungan sumber daya dapat berupa dari sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia seperti sumber daya alam dan sumber daya anggaran. Kaitannya dengan penambangan minyak bumi pada sumur tua di Struktur Banyubang ini, terdapat beberapa sumber daya yang mempengaruhi implementasi dari kebijakan yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yusuf selaku manager KUD Wargo Tani Makmur sebagai berikut :

“ Kalau masalah Sumber daya, ada beberapa sumber daya yang ada antara lain yang pertama, sumber daya manusia (SDA). SDA yang terlibat dalam penambangan sumur minyak tua di struktur Banyubang ini dibagi menjadi dua bagian yaitu dalam hal perijinan dan yang dikerahkan lapangan penambangan yaitu tenaga non skill yang diambilkan dari masyarakat disekitar wilayah sumur tua sedangkan pekerja skill diambilkan baik dari masyarakat setempat maupun dari luar daerah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian, Sumber daya alam jelas dengan adanya sumber daya alam yang memiliki sumber minyak bumi ini menjadikan pendukung dalam adanya penambangan sumur tua ini sehingga dapat menghasilkan produksi minyak bumi. Lalu dalam hal sumber daya anggaran, di penambangan sumur tua ini, KUD bekerja sama dengan swasta sebagai pihak yang mempunyai modal. Jadi pihak swasta itulah yang memodali dan yang melakukan operasional penambangan tersebut sesuai dengan standar operasional”. (hasil wawancara tanggal 12 Maret 2018 Jam 10.00 di Ruang Kantor KUD WATAMA Kecamatan Jiken)

Seperti yang dijelaskan bahwa terdapat beberapa sumber daya yang ada terkait dengan implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada



sumur tua yaitu antara lain ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang di maksud disini adalah sumber daya manusia sebagai implementor kebijakan yang telah berkontribusi baik itu dalam proses perijinan untuk mendapatkan ijin pengusahaan sumur tua, maupun sumber daya manusia yang berpartisipasi di lokasi lapangan dalam pengelolaan penambangan sumur tua di Struktur Banyubang.

Kemudian, terdapat sumber daya alam dan sumber daya anggaran. Sumber daya alam yang dimaksud disini adalah sumber daya alam berupa minyak bumi yang diusahakan untuk diproduksi didalam perut bumi. Konsesi tambang minyak Banyubang mempunyai potensi minyak bumi di beberapa titik sumur, dimana jumlah sumur di Banyubang terdapat 24 titik sumur tua namun tidak semua titik sumur tua tersebut aktif. Sebelum dilakukan penambangan sumur-sumur tua ini di lakukan penelitian atau evaluasi terlebih dahulu apakah terdapat sumber minyak bumi yang dapat diproduksi. Sumber daya alam berupa minyak bumi di struktur Banyubang terdapat hanya 5 sumur yang memproduksi. Berikut adalah foto titik sumur tua yang memproduksi menghasilkan minyak bumi.



Gambar 8. Titik Sumur tua
Sumber : Dokumentasi Penulis, 2018.

Gambar 8 diatas merupakan titik sumur tua di struktur Banyubang yang aktif dan diproduksi. Titik sumur tua tersebut dikelola dengan menggunakan sistem pompa dimana secara otomatis minyak dalam perut bumi keluar melalui pipa-pipa dan ditampung kedalam bak-bak penampungan minyak. Minyak yang dihasilkan masih tercampur dengan pasir dan air maka, dilakukan pemisahan atau penyaringan terlebih dahulu dari bak-bak yang berbeda.

Selanjutnya, dalam hal sumber daya anggaran yang dimaksud adalah dana atau *incentive* yang dapat mendorong atau memperlancar implementasi yang efektif. Sumber daya anggaran dalam implementasi penambangan yang diusahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur ini pihak KUD bekerjasama dengan pihak Swasta, karena KUD sendiri belum mampu apabila memodali



penambangan minyak bumi pada sumur tua secara mandiri karena perlu modal yang sangat besar.

c. Aktor atau Organisasi yang terlibat

Terimplementasinya suatu kebijakan tidak lepas dari adanya aktor-aktor atau organisasi yang terlibat. Adanya aktor atau organisasi yang terlibat inilah yang merupakan sumber daya manusia yang mempunyai tanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Maka dari itu penting bila suatu kebijakan yang akan diimplementasikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini diungkap oleh Manager KUD Wargo Tani Makmur Bapak Yusuf :

“KUD sebagai pengelola yang mengusahakan penambangan sumur tua di dukuh Banyubang. Pertamina, sebagai kontraktor. Pihak Swasta yang memodali serta yang melakukan kegiatan. BP3ESDM : sebagai pembinaan dan teknis. BLH sebagai badan kaitannya dengan pemeliharaan lingkungan hidup. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, sebagai pihak yang berkaitan pembinaan kepada masyarakat. Kepala Desa sebagai aktor yang bertugas kaitannya dalam sosial masyarakat di desa niku. Forkompimcam, kaitannya dengan pembiaian, administrasi, dan pengamanan di masyarakat desa.” (hasil wawancara tanggal 12 Maret 2018 Jam 11.00 di Ruang Kantor KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken)

Keterangan yang disampaikan oleh manager KUD Wargo Tani Makmur diatas menjelaskan bahwa terdapat pihak-pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan pengusahaan minyak bumi di lapangan seperti adanya peran dari pihak KUD, BP3ESDM, BLH, Forum Komunikasi Pimpinan Masyarakat dan Kepala desa. Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Adi Sucipto selaku Direktur BP3ESDM Kendeng Selatan:



“ Untuk masalah siapa saja yang terlibat, saya rasa semua terlibat, mulai dari Bupati, Gubernur, SKK Migas, Pertamina, KUD itu yang masalah perijinan saja. Kalau dilapangannya yang terkait ya KUD, BP3ESDM, BLH, Forkompimcam, dan Swasta yang melakukan penambangan itu.” (hasil wawancara tanggal 13 Maret 2018 Jam 10.00 di Ruang Kantor BP3ESDM Kendeng Selatan)

Penjelasan diatas menyatakan bahwa terdapat beberapa aktor maupun organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Antara lain dalam hal perijinan aktor maupun organisasi yang terlibat adalah KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken selaku pelaku utama sebagai implementor dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 01 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua, dimana KUD Wargo Tani Makmur ini wilayah usahanya mencakup keberadaan lokasi sumur tua yaitu di struktur Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken. Selanjutnya Bupati Blora yakni sebagai aktor yang memberikan rekomendasi pengusahaan minyak bumi pada sumur tua di tingkat Kabupaten melalui dinas terkait yang membidangi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Gubernur Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana pemerintahan di tingkat Provinsi yakni sebagai aktor yang berperan untuk memberikan persetujuan dari adanya rekomendasi pengusahaan pertambangan dari Bupati Blora.

Kemudian PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). BP Migas yang sekarang menjadi SKK Migas yang merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No 9 Tahun 2013 yang mempunyai peranan



penting dalam proses kegiatan hulu migas di Indonesia. Direktur Jenderal yang tanggung jawabnya dibidang minyak dan gas bumi.

Aktor – aktor diatas merupakan aktor yang bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi maupun ijin dalam pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua. Kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa organisasi yang terlibat antara lain : BP3ESDM Kendeng Selatan yang mempunyai tugas untuk memberikan pembinaan teknis maupun pengawasan terhadap KUD Wargo Tani Makmur dalam pelaksanaan penambangan di struktur Banyubang. Kemudian ada Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang kaitannya adalah dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Lalu dalam hal memberikan pembinaan sosial, dan keamanan ke masyarakat terdapat beberapa pihak yang terlibat antara lain adalah Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPIMCAM), dan Kepala Desa.

d. Koordinasi antar Organisasi

Implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila tujuannya dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan tersebut. Hal ini berguna agar dalam implementasinya implementor atau pihak yang terlibat dapat memahami tujuan yang dikomunikasikan. Mengenai koordinasi tersebut Bapak Yusuf selaku Manager KUD Wargo Tani Makmur mengungkapkan bahwa:

“Koordinasi dengan para aktor atau pihak-pihak yang terlibat dalam penambangan minyak bumi pada sumur tua selama ini berjalan dengan baik. Buktinya dari tahun 2009 sampai sekarang (tahun 2018) pengelolaan sumur tua di struktur banyubang ini masih berjalan dengan baik. Komitmen dari KUD sendiri yang didukung



oleh berbagai pihak seperti masalah perijinan kita berkoordinasi dengan Dinas ESDM Kabupaten Blora yang memberikan rekomendasi di tingkat Kabupaten, lalu dari rekomendasi tersebut harus mendapatkan persetujuan dari provinsi yaitu gubernur. Selanjutnya dari SKK Migas sampai ke kementerian ESDM, kemudian jelas paling aktif kita berkoordinasi dengan pihak Pertamina sebagai kontraktor yang mana hasil produksi ini kita serahkan ke Pertamina sesuai perjanjian lalu kita juga selalu melakukan laporan rutin atas produksi minyak ini, kemudian dalam kegiatannya di lapangan untuk masalah lingkungan karena ini dalam lingkup penambangan ya kita ada koordinasi dengan pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH), kemudian untuk sosial masyarakat kita masih berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan masyarakat, serta kepala desa. Koordinasi ini yang menjadikan sampai sekarang penambangan masih berjalan.” (hasil wawancara tanggal 12 Maret 2018 Jam 10.10 di Ruang Kantor KUD WATAMA)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat koordinasi dengan para aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan dalam perijinan pengusahaan penambangan. Dimana KUD wargo tani makmur sendiri melakukan koordinasi dengan Pertamina, Dinas ESDM, SKK Migas sampai ke Kementerian ESDM. Kemudian di lapangan, KUD juga melakukan koordinasi dengan BLH mengenai pengelolaan lingkungan hidup, Forkompimcan dan kepala desa untuk pembinaan masyarakat.

Selanjutnya mengenai koordinasi antar organisasi juga di ungkap oleh Bapak Yusmanto selaku staf ahli ESDM BP3ESDM:

“Untuk koordinasi, dari KUD dan Pertamina yang sebelumnya sebagai WKP ya awalnya dengan BP3ESDM ini ya dalam hal konsultasi aja. Bagaimana bagusnya dan bagaimana memberikan hasilnya atau dalam hal urusan bagi hasilnya. Dalam hal perizinan kita hanya memberikan rekom ke pusat (Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah) untuk kemudian dapat diteruskan ke pinak SKK Migas dan Kementerian ESDM untuk dapat mendapatkan pesetujuan.” (hasil wawancara tanggal 7 Maret 2018 Jam 10.00 di Ruang Kantor BP3ESDM Kendeng Selatan)

Bagan tersebut diatas merupakan alur perizinan dalam hal pengusahaan sumur tua menurut Pedoman Tata Kerja (PTK) Nomor 023/PTK/III tahun 2009. Prosedur tersebut ialah sebagai berikut :



- 1) KUD mengajukan permohonan kepada Pertamina selaku Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), dalam hal ini kontraktor yang dimaksud adalah PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu dengan tebusan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Migas dan Kepala SKK Migas. Dalam permohonan tersebut KUD melampirkan dan melengkapi persyaratan dokumen-dokumen administrasi dan teknis. Pada tahap ini perlu adanya rekomendasi dari Kabupaten terlebih dahulu yaitu melalui Dinas ESDM Kabupaten Blora.
- 2) Kemudian KKKS wajib melakukan evaluasi administrasi dan teknis atas permohonan KUD tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada pada PTK No 23 tahun 2009. Apabila berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dari KKKS permohonan KUD memenuhi persyaratan maka KKKS dapat meneruskan permohonan kepada SKK Migas dengan melampirkan hasil evaluasi dan rekomendasi Pertamina atas pengelolaan sumur tua dan pokok-pokok usulan perjanjian. Dalam proses evaluasi ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kalender setelah dokumen-dokumen tersebut dilengkapi oleh KUD.
- 3) SKK Migas melakukan evaluasi dari permohonan yang telah diteruskan oleh KKKS tersebut disertai hasil evaluasi administrasi dan teknis serta rekomendasi terkait pengelolaan sumur tua tersebut.
- 4) Permohonan dari KUD oleh SKK Migas akan diteruskan kepada Menteri ESDM cq Dirjen Migas, yang disertai pertimbangan teknis dan ekonomis dengan melampirkan pokok-pokok usulan perjanjian. Proses evaluasi ini



diberikan jangka waktu paling lama 30 hari kalender setelah seluruh data dilengkapi oleh KKKS

5) Setelah Menteri ESDM cq. Dirjen Migas menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada SKK Migas, SKK Migas meneruskan persetujuan atau penolakan tersebut kepada KKKS untuk disampaikan kepada KUD.

6) Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM atas permohonan KUD, selanjutnya KKKS dan KUD wajib menyelesaikan persetujuan sumur tua minimum memuat ketentuan sebagai berikut,

a) Jumlah dan lokasi sumur tua yang akan diproduksi

b) Imbalan jasa

c) Jangka waktu perjanjian sumur tua

d) Alat bantu mekanik atau teknologi yang digunakan

e) Tenaga kerja

f) Mutu dan spesifikasi minyak bumi

g) Titik penyerahan minyak bumi

h) Aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup

i) Aspek teknik pengelolaan maupun permodalan

j) Penyelesaian perselisihan dan lain-lainnya mengenai hak dan kewajiban KUD dan KKKS

7) Dalam perjanjian antara KUD dan KKKS tersebut, KUD wajib menyerahkan seluruh produksi minyak bumi kepada KKKS apabila KUD terbukti tidak menyerahkan hasil produksi kepada KKKS dan



mendapatkan peringatan tertulis 3 kali berturut-turut maka KKKS berhak memutuskan perjanjian sumur tua secara sepihak tanpa kewajiban pembayaran apapun kepada KUD. KUD disini bertanggung jawab penuh kepada KKKS atas setiap kerugian yang timbul kepada KKKS ataupun pihak lain dalam melaksanakan perjanjian memproduksi minyak bumi.

Penjelasan diatas menjelaskan mengenai koordinasi antara KUD Wargo Tani Makmur dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses perijinan dalam pengusahaan minyak bumi pada sumur tua di Struktur Banyubang. Koordinasi dilakukan dari tingkat Kabupaten, Provinsi, sampai ke pemerintahan Pusat. Proses implementasi selanjutnya adalah kegiatan yang dilakukan dilapangan penambangan minyak bumi pada sumur tua di Banyubang dimana KUD Wargo Tani Makmur selalu berkoordinasi dengan pihak PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu. Mengenai koordinasi antara KUD dengan pihak PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, terdapat alur penyerahan hasil produksi minyak bumi pada sumur tua ini. Minyak mentah yang diproduksi oleh KUD dari lokasi sumur minyak diangkut ke pusat penampungan minyak milik PT Pertamina EP dengan pertimbangan kualitas minyak kadar airnya maximum 10%. Setor minyak yang telah diterima oleh PT Pertamina EP tersebut, KUD mendapatkan bukti penerimaan minyak yang isinya antara lain:

- a) jumlah/volume minyak yang diterima
- b) bukti penerimaan dari PT Pertamina EP, yang digunakan sebagai dasar untuk pengajuan, pengalihan atau pembayaran kepada PT Pertamina EP

KUD mengajukan penagihan pembayaran minyak yang disetor setiap bulan sekali kepada PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu yang dilampiri, kwitansi pembayaran, rekap penerimaan atau setoran minyak dilampiri bukti setor minyak dan faktur pajak. Berikut adalah contoh surat perintah angkut minyak dari KUD ke PT Pertamina EP.

KUD "WARGO TANI MAKMUR"

Kecamatan Jlen, Kabupaten Blora
Desa, 8732, Telp. 0291-8196
Alamat : Jl. Raya Blora-Cepu No. 52
Telp./Fax. (0291) 525-01
E-mail : kudwargotanimakmur@yahoo.co.id

Bank : Mandiri Cabang Blora
NPWP : 01.505.136.0-514.000

Faktur Unikum : No. 17316/01/2009
Tgl. 31 Oktober 1996
No. 75/11.06/PM/IV/2009/P.02
Tgl. 01 April 2009

SURAT PERINTAH ANGKUT

Nomor : _____ /SPA _____ /KUD.UM/ _____
Tanggal : _____

Diberikan kepada :
1. Nama Penjemput : _____
2. No. Kendaraan : _____
3. Diangkut dari Lokasi : _____
4. Samud. No. : _____
5. Jenis Barang : Minyak Mentah
6. Volume Angkut : _____ ltr. BS & W
7. Waktu Pengiriman : Jan _____ M/B
8. Diangkut dan dikirim ke : Pusat Penambangan Produksi (PPP) Menggung
PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu
9. Waktu Penerimaan : Jan _____ W/B
10. Volume Nyata (Netto) : _____ ltr. *)

Petugas KUD WARGO TANI MAKMUR

1. Pengirim : _____
2. Pengemudi : _____
3. Penambang : _____

Mengetahui
PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu
5. Sekuriti PPP Menggung

4. Pengirim Lokasi : _____
6. Penerima PPP Menggung : _____

Keterangan :

- (*) Disi oleh : _____
- Lembar 6 (warna merah) : _____
- Lembar 5 (warna kuning) : _____
- Lembar 4 (warna biru) : _____
- Lembar 3 (warna oranye) : _____
- Lembar 2 (warna hijau) : _____
- Lembar 1 (warna putih) : _____

Petugas PPP Menggung : _____
Pengirim Lokasi : _____
Sekuriti Lokasi : _____
Penerima PPP Menggung : _____
Pengemudi : _____
Penambang : _____
Pengirim KUD WARGO TANI MAKMUR : _____

Lembar ke-1

Gambar 10 . Surat Perintah Angkut
Sumber: KUD Wargo Tani Makmur,2018



Gambar 11. Minyak Siap Kirim
Sumber: dokumentasi peneliti, 2018.

Gambar 11 diatas menunjukkan minyak mentah yang siap dikirimkan kepada PT Pertamina yang tentunya sudah melalui proses pemisahan dari air, pasir dan lumpur melalui bak-bak penampungan. Minyak mentah tersebut di setor ke Pertamina guna diolah agar menjadi minyak yang siap dipasarkan di masyarakat luas.

Kemudian kaitanya dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup KUD berkoordinasi Badan Lingkungan hidup, untuk pengelolaan lingkungan KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora telah menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang direkomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora nomor: 660.1/740A/IX/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Rekomendasi atas DPLH kegiatan perusahaan minyak bumi pada sumur tua di lapangan Banyubang Kecamatan Jiken.

Secara umum isi dari UKL dan UPL tersebut meliputi lingkup usaha atau

kegiatan, evaluasi dampak lingkungan hidup, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan penambangannya para aktor maupun organisasi yang terlibat ini KUD berkoordinasi dengan para pihak-pihak yang terlibat, seperti untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar daerah penambangan bahwa di daerah tersebut akan dilakukan kegiatan penambangan dalam hal ini KUD berkolaborasi dengan Kepala Desa, dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang terdiri dari Camat, pimpinan instansi Kepolisian di Kecamatan dan pimpinan kewilayahan TNI di Kecamatan untuk pembinaan, sosial dan pengamanan kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik sosial di masyarakat.

e. Kondisi sosial dan ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi merupakan salah satu variabel yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dari sisi sosial dapat diketahui bagaimana respon masyarakat dengan adanya kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut apakah dapat diterima dengan baik atau sebaliknya. Kemudian dalam sisi ekonomi apakah kebijakan yang diimplementasikan tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Mengenai kondisi sosial dan ekonomi dalam pengimplementasian Peraturan Menteri ESDM No 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua, yang mana KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken merupakan salah satu implementor dari peraturan



tersebut, Bapak Yusuf selaku manager KUD Wargo Tani Makmur menyatakan bahwa:

“Pada awalnya kita selaku KUD yang ingin mengusahakan sumur tua di struktur Banyubang ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar bahwa akan adanya penambangan minyak di dukuh tersebut. Hal tersebut disambut dan diterima baik oleh masyarakat karena dengan adanya penambangan ini kan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. kemudian selain itu kita juga memberikan dana desa untuk pengembangan desa. Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang sejauh ini sudah mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait, saya rasa tidak ada masalah. Hanya saja kendala dimasyarakatnya saja, karena juga mayoritas penduduk disana juga berpendidikan rendah jadi kita hanya bisa merekrutnya sebagai tenaga kerja non skill saja.” (hasil wawancara tanggal 12 Maret 2018 Jam 10.30 di Ruang Kantor KUD WATAMA Kecamatan Jiken)

Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa disisi sosial dari adanya implementasi dari Peraturan Menteri ESDM No 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua ini telah mendapatkan respon baik dari masyarakat sekitar area penambangan, karena mayoritas dari penduduk di Desa Bangowan berpencaharian sebagai petani atau pekebun dan pengangguran juga banyak maka, dengan adanya penambangan ini maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar area penambangan khususnya Desa Bangowan. Namun, karena mayoritas warga desa Bangowan berpendidikan rendah yang direkrut untuk bekerja di penambangan tersebut, maka warga hanya dijadikan tenaga non skill sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan. Kemudian mengenai kondisi sosial ekonomi desa Bangowan diungkap oleh Bapak Sudarto selaku Kepala Desa Bangowan:



“ya begini mbak, kondisi masyarakat sini ya tergolong masih rendah, kebanyakan masyarakat sini mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan pekebun. Dengan adanya penambangan di desa Bangowan ini ya sangat diterima dengan baik oleh masyarakat. Lumayan kan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan penambangan, walaupun hanya sekedar menjadi tenaga kerja kasaran saja lah, mengingat tingkat pendidikan mereka juga masih rendah. Pekerjaan penambangan ini ya sebagai sampingan saja bukan sebagai pekerjaan tetap. Kalo masalah pengaruhnya ke masyarakat, dulu memang ada pengaruhnya karena awal penambangan memang dibutuhkan tenaga banyak, kemudian ada sumbangan buat dana desa. Tapi kalo serakang saya kurang tahu mungkin karena masih belum maksimal dalam produksinya, jadi belum ada pengaruh baik bagi desa lagi.” (hasil wawancara tanggal 28 Maret 2018 Jam 18.30 di rumah Bapak Sudarto)

Pemaparan diatas menyatakan mengenai kondisi masyarakat di Desa Bangowan dimana desa tersebut merupakan lokasi kegiatan penambangan minyak bumi di sumur tua. Awal dari akan diadakannya penambangan sumur minyak tua ini direspon dengan baik oleh masyarakat sekitar, karena dengan adanya kegiatan ini terdapat partisipasi dari masyarakat untuk andil dalam kegiatan penambangan, hal ini otomatis akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan dapat mengurangi pengangguran. Namun dalam perkembangannya, dengan adanya pergantian investor yang berbeda pada tahun 2017 dengan sistem teknologi yang berbeda pula, hal ini menyebabkan pengelolaan minyak bumi di struktur Banyubang tersebut belum maksimal dan belum dapat memberikan kontribusi kepada desa. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Sukarian selaku Kepala Dukuh Bangowan menyatakan bahwa:

“Secara umum kondisi sosial ekonomi nggeh ngeten niki, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Terus wonten sosialisasi nek bade wonten penambangan ini nggeh seneng. Riyin pas Witsun beroperasi ya Mboten dipungkiri memang masyarakat sangat

bergantung pada penambangan, sak niki dereng wonten ketinggal. (hasil wawancara tanggal 13 Maret 2018 Jam 15.30 di rumah bapak sukarlan)

Pernyataan dari Kepala Desa Bangowan dan Kepala Dusun Banyubang tersebut membuktikan bahwa mayoritas penduduk Desa Bangowan bekerja sebagai petani dan pekebun. Selain itu tingkat pendidikan juga masih rendah, maka penduduk setempat hanya dipekerjakan sebagai pekerja non-skill. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi penambangan sumur tua tersebut di terima baik oleh masyarakat setempat. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Desa Bangowan semenjak dulunya penambangan dilakukan oleh PT Witsun, masyarakat yang terlibat dalam penambangan cukup banyak. Namun setelah berganti dengan menggandeng investor PT Idea Energi Blora, masyarakat yang dibutuhkan hanya sedikit dan belum maksimal dalam pengelolaannya, sehingga belum dapat memberikan kontribusi untuk desa setempat.

Tabel 6. Perbandingan Kinerja Pihak Swasta dalam Penambangan sumur tua di Dukuh Banyubang

PT Witsun (2010-2015)	PT Idea Energi Blora (2017 sampai sekarang)
i. Mempekerjakan masyarakat lokal sebanyak 125-160 orang	i. Kurang lebih mempekerjakan 25 orang
ii. Teknologi yang digunakan menggunakan alat timba, 1 sumur di handle 6 orang	ii. Teknologi yang digunakan menggunakan alat pompa 1 sumur dapat di handle 1 orang
iii. Produksi stabil	iii. Produksi belum maksimal/stabil

Sumber: hasil olahan penulis, 2018

Penjelasan diatas bisa diketahui bahwa dalam kegiatannya, penambangan sumur tua yang dikelola oleh KUD yang berkolaborasi dengan pihak swasta



ini sebenarnya sudah mendapatkan dukungan oleh pihak-pihak terkait. KUD dan pihak-pihak lainpun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan diterima baik oleh masyarakat. Namun, dalam kegiatannya penambangan minyak bumi pada sumur tua di Dukuh Banyubang tidak sepenuhnya memberikan pengaruh peningkatan yang signifikan kepada masyarakat Dukuh Banyubang Desa Bangowan. Karena mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, dan pendidikan yang dipunyai juga masih rendah maka hanya dijadikan sebagai tenaga kerja non-skill.

Masyarakat banyak berpartisipasi pada saat PT Witsun beroperasi, disitu masyarakat bekerja sebagai tenaga kerja non skill untuk membangun jalan dan pekerjaan lainnya. Karena dalam aktifitas penambangan secara teknis tenaga kerja yang dipekerjakan harus yang sudah ahli dan berpengalaman pada bidang penambangan. Setelah pekerjaan selesai, pihak KUD dan Swasta memutuskan untuk memangkas tenaga kerja karena memang pekerjaan yang mereka kerjakan sudah selesai, namun masyarakat menuntut untuk tetap dipekerjakan, hal inilah yang membuat swasta kolaps. Kemudian hal ini membuktikan bahwa adanya penambangan minyak bumi pada sumur tua ini membuat masyarakat sangat tergantung dari pekerjaan ini.

Meskipun KUD wargo tani makmur saat ini sudah berganti kolaborasi dengan pihak swasta lain yaitu PT Idea Energi Blora, hal ini tidak pula menjadikan peningkatan dalam partisipasi masyarakat karena dengan teknologi yang digunakan saat ini yaitu dengan sistem pompa yang berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu menggunakan sistem timba, hal ini membuat



swasta hanya memerlukan tenaga kerja yang tidak banyak. Karena masih berjalan beberapa bulan, serta dengan produksi yang belum cukup maksimal maka kegiatan penambangan ini belum memberikan kontribusi banyak bagi masyarakat sekitar. Selain itu produksi minyak bumi yang dihasilkan dari penambangan minyak bumi ini juga menurun dari tahun ke tahun hal tersebut di buktikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Data Produksi Sumur Tua Banyubang

No	Tahun	Jumlah produksi/Liter
1	2013	3.294.484,40
2	2014	2.307.851,19
3	2015	571.251,72

Sumber: KUD Wargo Tani Makmur, 2015

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa produksi tiap tahun mengalami penurunan. Seperti yang dijelaskan oleh manager bapak Yusuf bahwa untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dalam adanya penambangan ini, maka diberikan dana desa sebesar Rp 10,- per liter dari penghasilan produksi minyak bumi pada sumur tua di Desa Bangowan. Itu artinya apabila hasil produksi dari penambangan ini berkurang maka dana untuk pengembangan desa pun juga akan berkurang.

f. Dampak Kebijakan

Suatu kebijakan maupun peraturan yang mengatur pasti terdapat adanya dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan yang diterapkan tersebut bagi semua pihak yang terkait. Dampak yang diperoleh dapat berupa dampak



positif maupun dampak negatif. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Yusuf selaku Manager KUD WATAMA sebagai berikut :

“ Dalam kegiatan penambangan tentu hal ini akan menimbulkan berbagai dampak, salah satunya adalah dampak positif bagi kami selaku KUD, dimana KUD dapat mengusahakan minyak bumi di sumur tua ini serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya kebijakan Peraturan Menteri No 01 Tahun 2008 ini KUD WATAMA ini menjadi *pilot project* yang mengusahakan penambangan sumur tua. Kemudian dampak negatifnya ialah adanya resiko dampak lingkungan. Karena resiko dari adanya penambangan minyak bumi ini adalah adanya limbah, sejauh ini limbah yang dibuang masih dalam batas wajar, misalnya standarnya di 08 kita masih di 05 jadi masih aman. Limbah yang disini dialirkan ke sungai, karena air yang di hasilkan bersamaan dengan minyak ini adalah air tawar maka kita tidak repot untuk membuangnya. Kalau air asin maka air harus di tawarkan dulu baru di buang. Dan semaksimal mungkin limbah-limbah ini kita proses terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai.” (Hasil wawancara tanggal 12 maret 2018 jam 10.30 di ruang kantor KUD WATAMA)

Pemaparan oleh Bapak Yusuf selaku manager KUD wargo tani makmur tersebut menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif dari adanya penambangan minyak sumur tua di struktur Banyubang antara lain , Pertama, dapat memberikan tambahan pendapatan bagi KUD dengan mengusahakan penambangan sumur minyak tua tersebut. Kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar area penambangan. Sedangkan dampak negatifnya adalah masih ada resiko dampak lingkungan yang akan terjadi. Hal tersebut di support oleh Bapak Adi Sucipto selaku Direktur Bidang ESDM BP3ESDM juga menyatakan sebagai berikut :

“ Dengan adanya Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 ini kan membuka peluang bagi KUD yang wilayahnya masuk dalam lokasi sumur tua untuk dapat mengusahakan pertambangan tersebut. Kemudian dengan ada peraturan ini juga dapat menertibkan atau menghilangkan praktek-praktek ilegal dalam penambangan sumur



tua yang pengusahanya tidak mempunyai ijin resmi.” (Hasil wawancara tanggal 13 maret 2018 jam 10.35 di ruang kantor BP3ESDM Kendeng Selatan)

Pemaparan yang disampaikan oleh Direktur Bidang ESDM BP3ESDM tersebut menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan Peraturan Menteri ESDM No 91 Tahun 2008 tersebut memberikan dampak positif yaitu dapat menambah peluang usaha untuk KUD dan menghapus praktek-praktek atau kegiatan ilegal dalam penambangan sumur tua dimana pengusaha yang mengelola sumur tua tersebut tidak mempunyai izin resmi. Kemudian, dampak lain dari adanya kebijakan penambangan ini diungkapkan oleh Bapak Sukarlan selaku Kepala Dukuh Banyubang sebagai berikut :

“riyin pancen wonten dampak positif kangge masyarakat mriki tapi sak niki dereng wonten dampak positif kangge masyarakat setempat, malah dampak negatif sejak niki (PT Idia Energi Blora) masuk malah pak lurah di getingi warga mriko. Masalah nggen mungkin karena limbah. Kan riyin limbah di alirkan mriko, sak niki mpun dialihke lewat mriki, tapi nggih nyatane derang wonten dampak limbah nopo-nopo teng mriki sejauh niki” (Hasil wawancara tanggal 13 maret 2018 jam 15.45 di rumah Bapak Sukarlan)

(Dulu memang ada dampak positif untuk masyarakat sini, namun sekarang belum ada dampak positif bagi masyarakat setempat, malah dampak negatif karena adanya masalah limbah, namun sekarang sudah di atasi dengan mengalihkan aliran limbah yang berbeda dari yang kemaren, dan belum ada dampak yang kelihatan semenjak itu).

Pemaparan dari Bapak Sukarlan selaku Kepala Dukuh Banyubang tersebut menyatakan bahwa dalam kegiatannya penambangan sumur tua di Dukuh Banyubang ini dulu terdapat dampak baiknya yaitu menambah lapangan pekerjaan masyarakat, selain itu juga dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Adapun dampak negatif yang dirasakan masyarakat



Dukuh Banyubang Desa Bangoan yakni : Pertama, bahwa adanya penambangan ini sempat ada isu-isu dari masyarakat mengenai limbah yang meluber dan mencemari lahan sawah masyarakat. Hal inipun mendapat respon dari pihak-pihak terkait mengenai isu ini, para pihak seperti KUD, Pertamina, BP3ESDM, BLH, Forkompimcam, Kepala Desa semua turun tangan saling berkoordinasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal-hal tersebut dijelaskan pula oleh Bapak Adi Sucipto selaku Direktur Bidang ESDM BP3ESDM menjelaskan bahwa :

“Ada aduan masyarakat tentang limbah dari adanya penambangan di struktur banyubang, kemudian ada perintah dari bapak gubernur memerintah BP3ESDM untuk ditindaklanjuti. Kita melakukan pembinaan, pengawasan dan mediator antara masyarakat, pemerintah tingkat kecamatan yaitu Forkompimcam, pengusaha dan pekerja tentang penyelesaian aduan masyarakat mengenai isu limbah. Setelah kita telusuri apa masalahnya ternyata ada warga yang melapor bahwa katanya ada sawah yang tercemar limbah dari penambangan ini. Lalu kita melakukan koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengecek sawah tersebut, dan ternyata ketika ditelusuri sawah tersebut masih subur-subur saja, tidak mungkin kalau tercemar sawahnya masih ada hewannya seperti masih ada katak yang hidup disana. Menghindari hal-hal tersebut akhirnya kita dengan pihak-pihak lain mengalihkan alur pembuangan air limbah ke sungai.” (Hasil wawancara tanggal 13 maret 2018 jam 10.35 di ruang kantor BP3ESDM Kendeng Selatan)

Pemaparan dari Bapak Adi tersebut mengungkapkan bahwa terdapat dampak sosial masyarakat mengenai limbah. Namun, hal tersebut dapat terselesaikan dengan baik berkat hal tersebut langsung mendapatkan tindakan dari beberapa pihak yang berkepentingan. Konflik yang terjadi tersebut diselesaikan dengan musyawarah guna mendapatkan keadilan dari pihak yang bersangkutan. Kemudian hal serupa juga diungkap oleh Bapak Yusuf selaku

Manager KUD WATAMA :



“ Ya memang sempat ada konflik mengenai isu mengenai pencemaran lingkungan namun setelah diselidiki tidak ada apa-apa sebenarnya. Ya itu karena adanya oknum-oknum yang mengkonfrontasi adanya pencemaran ini sehingga terjadi rame-rame (demo). Pembuangan limbah ini kan di proses dulu, tidak mungkin limbah langsung kita buang begitu saja. Limbah ini semaksimal mungkin kita proses terlebih dahulu, kemudian yang dibuang ke sungai itu kan ada batas ambang tertentu jadi kita masih memenuhi prosedur yang disepakati juga oleh Pertamina.” (Hasil wawancara tanggal 12 maret 2018 jam 10.35 di ruang kantor KUD WATAMA Kecamatan Jiken)

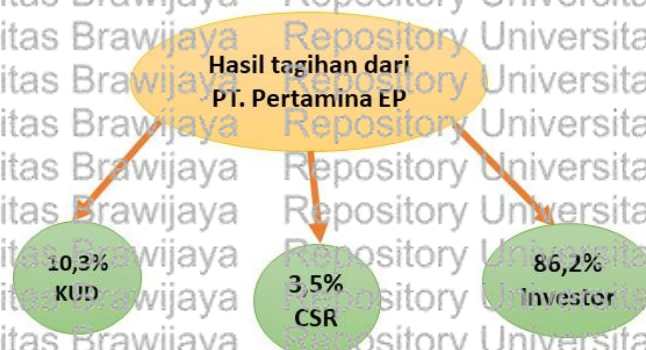
Hal diatas membuktikan bahwa terdapat dampak sosial masyarakat yang terjadi, yaitu adanya oknum masyarakat yang membuat isu mengenai pencemaran lingkungan oleh limbah. Perlu adanya pembinaan tertentu kepada masyarakat mengenai hal ini, karena dengan adanya masalah ini maka akan menghambat jalannya kegiatan penambangan minyak bumi pada sumur tua di Dukuh Banyubang tersebut. Selanjutnya dalam hal dampak ekonomi hal ini di ungkap oleh Kepala BP3ESDM Wilayah Kendeng Selatan Agus menyatakan sebagai berikut:

“ Dengan adanya Peraturan Pemerintah ESDM No 01 Tahun 2008 ini maksudnya pemerintah sih bagus dengan adanya keterlibatan KUD yang ini. Namun masalah finansial dalam perusahaan penambangan di sumur tua ini masih menjadi kendala dimana KUD tidak akan mampu dalam memodali sendiri segala operasional penambangan, karena butuh modal yang sangat besar dan resiko yang sangat tinggi. Maka dari itu KUD menggandeng swasta untuk menjadi investor sekaligus operator dalam penambangan minyak bumi pada sumur tua. Kemudian, dalam usahanya KUD Watama hanya memperoleh ongkos angkat dan angkut saja dimana hal ini mengikuti pergerakan kurs dollar yang naik turun.

SIMULASI TAGIHAN JANUARI 2018		
ICP Cepu bulan Desember 2017	USD	56,27 / Barrel
Kurs Tengah rata-rata bulan Desember 2017 :	Rp.	13.556,67
Formula :	$70\% \times \text{ICP Cepu} \times \text{Kurs Tengah rata-rata perbulan BI}$	
	$70\% \times 56,27 \times \text{Rp } 13.556,67$	
	158.987	
Harga Imbalan Jasa dikurangi	Rp.	3.358,56 / Liter
Biaya Treatment Minyak Bumi di MGS Menggung :	Rp.	35 / Liter
Harga Imbalan Jasa yang dibayarkan untuk bulan Januari 2018	Rp.	3.323,66 / Liter

Gambar 12. Imbalan Jasa
Sumber: KUD Wargo Tani Makmur, 2018.

Gambar diatas merupakan tarif imbalan jasa angkat dan angkut minyak mentah pada bulan januari 2018 yang dibayarkan oleh pihak PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu kepada KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken. Tarif imbalan jasa angkat dan angkut minyak mentah setiap bulan berubah berdasarkan Kurs Tengah USD dan harga Minyak Mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price* (ICP) bulan sebelumnya. Kemudian, terdapat bagi hasil yang di bagikan kepada pihak yang terlibat dalam produksi minyak bumi pada sumur tua, adapun porsi dalam bagi hasil tersebut seperti pada gambar berikut:



Gambar 13. Bagi Hasil Produksi Minyak
Sumber : KUD Wargo Tani Makmur, 2018.



Gambar diatas dijelaskan bahwa terdapat bagi hasil dari produksi minyak mentah yang dihasilkan dari penambangan di sumur tua di struktur Banyubang yaitu yang diusahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken yang bekerjasama dengan pihak swasta selaku investor. Dari hasil produksi minyak yang dihasilkan minyak mentah tersebut wajib disetorkan kepada pihak PT Pertamina EP selaku KKKS yang membeli minyak dari hasil produksi tersebut. Output dari produksi minyak bumi tersebut dibagi dengan pihak yang bersangkutan tersebut, yang mana dari harga minyak yang telah dibeli oleh PT Pertamina EP tersebut pihak KUD mendapatkan 10,3% yang didapatkan dari ongkos angkat dan angkut seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian 3,5% untuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan 86,2% untuk pihak swasta selaku investor.

Penjelasan diatas menyimpulkan bahwa terdapat dampak positif maupun negatif yang terjadi dari adanya penambangan minyak bumi pada sumur tua. Dampak positif yang ada antara lain dapat menambah pendapatan KUD, menghilangkan praktek ilegal, menambah lapangan pekerjaan masyarakat desa Bangowan serta menambah pendapatan desa namun hal ini disesuaikan dengan manajemen pihak swasta dalam memproduksi minyak bumi. Dampak negatif yang ada yaitu masih terdapatnya konflik sosial yang terjadi akibat adanya isu limbah dari penambangan, namun hal tersebut telah ditangani oleh pihak-pihak terkait.



2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

a. Faktor Pendukung

Dalam melakukan implementasi kebijakan tentunya terdapat faktor-faktor yang mendukung implementor untuk dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. faktor pendukung inilah yang menjadikan kebijakan tersebut terealisasi dengan baik di lapangan. Dalam hal penambangan sumur tua yang diusahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken, berikut terdapat beberapa faktor pendukung yang ada dalam implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua, seperti yang diungkap oleh Bapak Yusuf selaku manager KUD Wargo Tani Makmur (WATAMA) sebagai berikut :

“ Faktor pendukung implementasi penambangan minyak bumi pada sumur tua ini antara lain yang pertama pastinya ya adanya Permen ESDM No 01 Tahun 2008 itu, yang kedua, adanya faktor sumber daya alam di dukuh banyubang ini yang sejarahnya kan memang bekas penambangan jaman dulu terus tidak diusahakan lagi. Hal itu dibuktikan adanya cerita masyarakat setempat yang dulu bekerja ditambang minyak pada sumur tua tersebut selain itu juga ada peta lama zaman Belanda tentang keberadaan sumur tua. Hal tersebut kan membuktikan bahwa sumber daya alam di dukuh banyubang ini memang menyimpan sumber minyak bumi, kemudian, dalam penambangan minyak bumi ini struktur banyubang menggunakan peralatan penambang dengan teknologi yang sederhana namun tepat guna. (Hasil wawancara tanggal 23 Februari 2018 jam 10.10 di ruang kantor KUD WATAMA Kecamatan Jiken).”

Penjelasan diatas menyatakan bahwa faktor pendukung dari implementasi kebijakan ini adalah sebagai berikut :



- 1) Adanya Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi. Dimana peraturan ini merupakan salah satu payung hukum dalam adanya penambangan minyak bumi pada sumur tua yang dapat di usahakan oleh KUD yang wilayahnya mencakup sumur minyak tua. Dimana dalam pengusahaannya dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Bangowan, menambah pendapatan KUD dan desa, serta dapat menghapus praktek ilegal dalam penambangan sumur minyak tua yang ada.
- 2) Sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi. Baik itu berupa sumber daya alam yang melimpah yaitu berupa potensi minyak bumi yang melimpah pada sumur tua di Dukuh Banyubang Desa Bangoan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Serta sumber daya anggaran sebagai *incentive* sebagai pendorong atau yang dapat memperlancar implementasi berjalan secara efektif dimana KUD watama memperoleh dukungan modal dari swasta.
- 3) Adanya komitmen dari para pihak yang terkait dalam pengusahaan penambangan ini antara lain adalah adanya komitmen dari KUD Wargo Tani Makmur yang ingin mengusahakan sumur minyak tua tersebut yang didukung oleh para aktor dan organisasi yang terlibat dalam proses perijinan dari tingkat pemerintahan kabupaten sampai ke pemerintah pusat, sehingga menjadikan KUD Watama menjadi *Pilot*



Project dalam adanya kebijakan Pertambangan minyak bumi pada sumur tua.

b. Faktor Penghambat

Suatu kebijakan atau peraturan yang diimplementasikan pastinya terdapat faktor-faktor penghambat yang menghambat jalannya suatu implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan mengenai penambangan minyak bumi pada sumur tua ini mempunyai beberapa faktor penghambat. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yusuf selaku Manager KUD WATAMA :

“Faktor penghambatnya yang pertama masih minimnya data atau bahkan datanya mengenai data-data sumur tua yang ada misal data produksi, pernah diproduksi tahun berapa, berapa sumur yang diproduksi, sumur-sumur mana saja yang produksi dan lain-lain. kemudian proses perijinan yang membutuhkan waktu lama dulu saya mengurus sampai jadi itu membutuhkan waktu setahun lebih, mulai dari mengajukan permohonan ke tingkat Kabupaten, Provinsi sampai ke Pusat (Kementerian ESDM). Kemudian, Kemudian teknologi yang digunakan masih saja ada kendala sehingga tidak bisa mendeteksi kendala sumur tua yang diproduksi.” (Hasil wawancara tanggal 12 Maret 2018 jam 10.15 di ruang kantor KUD WATAMA Kecamatan Jiken) ”

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat jalannya kegiatan Seperti masih minimnya data, dukung mengenai produksi sumur tua, pengurusan ijin perusahaan penambangan yang memerlukan waktu panjang, teknologi yang digunakan dalam penambangan juga masih terdapat kendala.

Sesuai dengan data yang dihimpun oleh KUD Watama menggunakan sistem timba hasilnya lebih stabil produksinya dibandingkan dengan menggunakan sistem pompa yang hasil produksinya cenderung tidak stabil. Namun, memproduksi minyak bumi menggunakan pompa masih tetap



digunakan untuk sumur yang cairannya cukup besar karena jika menggunakan timba tidak mampu atau tidak bisa menghasilkan minyak. Mengenai teknologi yang digunakan dalam penambangan ini, Bapak Romi selaku penambang mengatakan bahwa:

“kalo bicara tentang efektif mana antara pompa dan timba, itu tergantung ya mbak, kalo ritnya memenuhi ya maksimal pompa. Kalo timba kan jelas tenaga kerja lebih banyak, buat nimba, buat operator truk dan lainnya. Tapi pompa ini kan kendalanya pada alatnya itu, kan air campur pasir dan minyak yang dipompa itu menyebabkan kabel konektor putus. Itu yang menyebabkan produksi selama ini belum maksimal dan terhambat karena kita melakukan perbaikan terus” (wawancara pada tanggal 30 maret 2018 di lokasi penambangan struktur Banyubang)

Sejak 2017 KUD Wargo Tani Makmur yang bekerjasama dengan PT Idea Energi Blora tersebut mengelola dengan menggunakan sistem pompa. Pompa yang dimaksud tersebut menggunakan teknologi *Electrical Submersible Pump* (ESP) dengan menggunakan alat ini minyak bumi dapat langsung terangkat secara sendirinya yang kemudian hasilnya langsung ditampung pada bak-bak penampungan untuk dipisahkan minyak dan airnya. Teknologi ini hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja saja karena dalam mengambil minyak bumi secara otomatis dilakukan dengan menggunakan teknologi pompa tersebut secara kontinu dan pekerja hanya diperlukan kontrol saja. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kekurangan dalam pompa yang digunakan ini, karena pompa sering kemasukan pasir jadi dapat merusak pompa dan tentunya hal ini menghambat jalannya proses pengambilan minyak bumi di sumur tua tersebut.



Berbeda dengan sistem timba yang masih cukup sederhana. Pengerjaan dalam mendapatkan minyak bumi dengan sistem timba ini memerlukan banyak tenaga kerja. Sistem timba ini tidak dapat bekerja secara otomatis secara sendirinya untuk mendapatkan minyak bumi karena harus terdapat orang yang selalu *standby* untuk menimba minyak bumi tersebut. Untuk menarik timba tersebut diperlukan truk

C. Analisis Data Penelitian

Kebijakan publik menurut pendapat Candler dan Plano dikutip oleh Keban (2014:60) ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar dapat hidup dan ikur serta dalam berpartisipasi dalam pemerintahan. Sesuai dengan pendapat tersebut kebijakan mengenai penambangan minyak bumi pada sumur tua yang di buat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan upaya yang strategis untuk memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada dalam memecahkan masalah mengenai penambangan minyak bumi pada sumur tua

Implementasi kebijakan penambangan sumur tua berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 mengenai penambangan minyak bumi pada sumur tua yang diusahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken pada



penambangan di Dukuh Banyubang Desa Bangoan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kembali produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya. Sumur tua yang diproduksi disini adalah sumur tua yang terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontaktor.

Pembahasan ini peneliti menggunakan teori menurut pendapat dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, (1975) yang akan menggambarkan apakah kebijakan ini berhasil atau gagal dalam implementasinya. Peneliti meyakini bahwa suatu kebijakan akan berhasil apabila dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut. Sesuai dengan fokus serta penyajian data diatas, peneliti memulai pembahasan dengan menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua yang diusahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

2. Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.

Penjelasan mengenai Implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten



Blora, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dijelaskan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, 1975 (dalam Subarsono 2013:99-101) antara lain.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Meter dan Horn (1975) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Dari hal tersebut, kaitannya dengan Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh KUD Wargo Tani Makmur (WATAMA) Kecamatan Jiken Kabupaten Blora terhadap penambangan minyak bumi pada sumur tua. KUD wargo tani makmur mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur tua, dimana pada Bab I Ketentuan Umum pasal 2 dijelaskan bahwa :

- a. Kontraktor mempunyai kewajiban untuk mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua yang masih terdapat kandungan minyak bumi berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis
- b. Dalam hal kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUD atau BUMD dapat mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi setelah mendapat persetujuan Menteri
- c. Pengusahaan dan pemroduksian minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan Perjanjian memproduksi minyak bumi dengan kontraktor.

Selanjutnya pada Bab II Bagian Ketiga tentang Pelaksanaan Memproduksi Minyak Bumi, pasal 9 menyatakan ;



- (1) Pelaksanaan memproduksi minyak bumi oleh KUD atau BUMD hanya dapat dilakukan pada sumur tua yang telah disepakati oleh kontraktor dan KUD atau BUMD dalam perjanjian memproduksi minyak bumi.
- (2) KUD atau BUMD dalam melaksanakan memproduksi minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu mekanik atau teknologi yang disetujui kontraktor.

Kemudian Pasal 10 menyatakan:

- (1) KUD atau BUMD wajib menyerahkan seluruh produksi minyak bumi dari hasil pelaksanaan memproduksi minyak bumi kepada kontraktor.
- (2) Minyak bumi yang diproduksi oleh KUD atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan kepada kontraktor wajib memenuhi mutu dan spesifikasi yang disepakati oleh kontraktor dan KUD atau BUMD.

Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 diatas sudah jelas tentang kebijakan yang mengatur mengenai pengusahaan minyak bumi pada sumur tua bahwa yang dapat mengusahakan sumur tua yang sudah tidak di usahakan lagi oleh kontraktor atau Pertamina adalah hanya KUD dan BUMD yang wilayah usahanya mencakup lokasi sumur tua dengan persetujuan Menteri ESDM melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan SKK Migas. Kebijakan yang dibuat ini tentunya sudah memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua serta menjadi pedoman bagi KUD yang akan mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua.

Kemudian dalam mendukung adanya kebijakan ini terdapat pula Pedoman Tata Kerja (PTK) pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua yaitu PTK Nomor 023 Tahun 2009 Tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. PTK tersebut dijadikan pedoman bagi SKK Migas dan KKKS dalam menangani permohonan dari KUD dalam



mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua yang didalamnya sudah dijelaskan secara rinci mengenai prosedur perijinan pengusahaan serta terdapat ketentuan perjanjian dan syarat-syarat dalam memproduksi minyak bumi pada sumur tua. Dalam hal ini KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora menjadi *pilot project* dalam pengusahaan minyak bumi pada sumur tua. Meskipun dalam proses mendapatkan ijin pengusahaan melalui proses yang panjang dan lama namun KUD Wargo Tani Makmur berhasil mengusahakan penambangan ini pada tahun 2009 sampai sekarang dengan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait.

Sesuai dengan pendapat Van Meter Van Horn (dikutip dalam Subarsono, 2013:99) bahwa standart dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Standar dalam kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua adalah Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Dalam kenyataannya implementasi ini sudah jelas dan tidak terdapat konflik yang terjadi dengan para pihak yang terkait dalam proses perijinan pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua serta sampai pada proses operasional kegiatan di lapangan penambangan. Hal tersebut membuktikan bahwa para implementor kebijakan sudah cukup memahami kebijakan yang diimplementasikannya tersebut.



b. Sumber Daya

Sebuah kebijakan tidak akan berhasil apabila tidak ada sumber daya yang mendukung untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sesuai dengan pernyataan Van Meter Van Horn (dikutip dalam Subarsono, 2013-100) bahwa implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Dalam hal ini pengimplementasian kebijakan mengenai penambangan minyak bumi pada sumur tua sangat memperhatikan faktor sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia seperti sumber daya alam dan sumber daya anggaran yang dapat menunjang terwujudnya implementasi kebijakan yang baik.

Sumber daya manusia dalam proses implementasi kebijakan penambangan ini sudah cukup baik dalam hal proses perijinan. Jika dalam aktifitas di lapangannya tenaga yang digunakan adalah tenaga kerja skill dan tenaga kerja non skill. Tenaga kerja skill sendiri merupakan tenaga kerja yang telah disiapkan oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan KUD yang berkompeten dalam penambangan minyak bumi pada sumur tua. Sedangkan masyarakat lokal kebanyakan dijadikan sebagai tenaga kerja non skill karena tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu mayoritas dengan lulusan tingkat SMP dan SMA.

Selanjutnya sumber daya alam yang mendukung dengan adanya potensi sumber minyak bumi melimpah didalamnya sehingga dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sumber daya anggaran, dimana



pihak KUD sendiri tidak akan mampu untuk memodali penambangan minyak bumi pada sumur tua, maka dari itu KUD berkolaborasi dengan pihak swasta untuk dapat mendapatkan sumber daya anggaran yang dapat mendorong dalam kelancaran implementasi kebijakan ini untuk terealisasi dengan baik.

Selain sumber daya anggaran, pihak swasta juga menyiapkan alat bantu mekanik, serta teknologi yang digunakan dilapangan untuk proses penambangan minyak bumi, alat bantu mekanik dan teknologi yang digunakan ini tentunya sudah melalui persetujuan dari Pihak Pertamina.

c. Aktor atau organisasi yang terlibat

Adanya suatu implementasi kebijakan tidak lepas dari adanya peran dari para aktor maupun organisasi yang terlibat didalamnya. Dalam hal implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua ini terdapat beberapa aktor atau organisasi yang terlibat di dalamnya mulai dalam hal perijinan maupun dalam kegiatan penambangan di lapangan, hal ini dijelaskan pada Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 Bab II Pengusahaan Sumur Tua Pasal 3 ayat (1) dan (2) ;

- (1) Untuk dapat bekerjasama memproduksi minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), KUD atau BUMD mengajukan permohonan kepada kontraktor dengan tembusan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah Propinsi.

Sesuai dengan penjelasan diatas pada proses perijinan pengusahaan penambangan ini terdapat beberapa pihak yang terlibat antara lain adalah



KUD sebagai implementor yang mengurus mengenai ijin usaha penambangan. Pertamina sebagai Kontraktor yang mana area penambangan yang diusahakan oleh KUD merupakan wilayah kerja dari PT Pertamina Asset 4 Field Cepu. Kemudian dalam hal untuk mendapatkan rekomendasi dari Kabupaten, disini terdapat peran serta Bupati Blora dalam memberikan rekomendasi pengusahaan sumur tua kepada KUD. Kaitannya dalam pemberian rekomendasi, terdapat Peraturan yang mengaturnya yaitu dengan adanya Peraturan Bupati No 23 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua di Kabupaten Blora, dimana didalamnya dijelaskan Pada Bab IV Bagian Kedua Pemberian Rekomendasi Pasal 6 ;

- (1) Bupati memberikan rekomendasi pengusahaan minyak bumi pada sumur tua di daerah
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala SKPD yang membidangi Energi dan Sumber Mineral.

Hal diatas jelas bahwa terdapat peran serta Bupati dalam memberikan rekomendasi penambangan minyak bumi pada sumur tua, melalui pertimbangan teknis dari SKPD terkait yang membidangi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana yang dimaksud disini ialah peran dari BP3ESDM yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas (UPTD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 45 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Disini juga terdapat peran Gubernur dalam memberikan persetujuan dari rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati.



Selanjutnya permohonan dari KUD yang telah memenuhi persyaratan diteruskan oleh KKKS kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Disini terdapat peran dari SKK Migas yang merupakan instansi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengganti BP Migas. Serta yang terakhir ialah peran dari Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Migas yang merupakan titik akhir dalam mendapatkan persetujuan permohonan pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua.

Kemudian dalam hal pelaksanaan aktifitas penambangan minyak bumi pada sumur tua di Dukuh Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora ini terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam mendorong adanya efektifitas dalam implementasi kebijakan yang ada. Pihak-pihak tersebut antara lain ialah Badan Lingkungan Hidup, Forum Pimpinan Kecamatan, dan Kepala Desa.

d. Koordinasi antar Organisasi

Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar aktor atau instansi bagi keberhasilan suatu program. Van Meter dan Horn, 1975 (dikutip dalam Subarsono, 2013:100). Adanya koordinasi antar aktor atau organisasi ini merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Koordinasi antar aktor pada penambangan minyak bumi pada sumur tua di Dukuh Banyubang Desa Bangowan yang diusahakan oleh KUD Wargo Tani



Makmur Kecamatan Jiken ini sudah baik dan sesuai dengan perannya masing-masing. Hal tersebut terjadi karena implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Maka dari itu penting adanya untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi dengan berbagai sumber informasi.

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Dalam hal perijinan pengusahaan penambangan ini KUD yang berkoordinasi dengan PT Pertamina EP selaku kontraktor dimana dalam kegiatannya berpacu dalam Pedoman Tata Kerja No 023 Tahun 2009 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua. Dimana PTK tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur yang harus dijalankan agar suatu program tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian dalam hal rekomendasi dari kabupaten KUD berkoordinasi dengan BP3ESDM sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas (UPTD) untuk mendapatkan pertimbangan teknis untuk selanjutnya dapat diajukan ke Bupati untuk mendapatkan rekomendasi. Selain itu BP3ESDM juga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan penambangan minyak bumi pada sumur tua di Dukuh Banyubang. Kemudian dalam hal koordinasi kepada masyarakat KUD dengan pihak-pihak terkait diluar SKPD untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat



dengan adanya penambangan minyak bumi pada sumur tua di Dukuh Banyubang.

e. Kondisi sosial, dan ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi merupakan variabel yang diidentifikasi oleh Van Meter Van Horn. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Kelompok kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan penambangan ini sangat antusias dalam mendukung kegiatan penambangan di struktur Banyubang. Seperti misalnya melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kemudian masalah opini publik mengenai kebijakan ini ialah dengan adanya penambangan ini diharapkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah penambangan ini meningkat. Namun pada kenyataannya kondisi sosial ekonomi di Dukuh Banyubang Desa Bangowan ini masih tergolong rendah karena mayoritas penduduk di Desa Bangowan bernata pencaharian sebagai petani. Awal adanya penambangan memang tenaga dari masyarakat lokal yang ikut berpartisipasi cukup banyak yaitu memperkerjakan kurang lebih 125 sampai 160 orang, dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, disamping membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal juga terdapat dana desa yang dapat digunakan



untuk pengembangan desa. Namun dalam perkembangannya sempat terjadi konflik karena pemangkasan tenaga kerja lokal, karena pekerjaan yang mereka lakukan memang sudah selesai, namun hal ini warga menolak dan menuntut untuk tetap di pekerjaan, inilah yang membuat pihak KUD dan Swasta kewalahan untuk menggaji mereka karena pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran dan akhirnya kolaps.

Awal kegiatan penambangan ini tenaga kerja dari masyarakat lokal hanya sebatas tenaga kerja non-skill yang dipekerjakan untuk membangun jalan, security dan pekerjaan lain diluar hal mengenai penambangan. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal mempunyai pendidikan yang kurang, bahkan hanya lulusan SD atau SMP. Kemudian dalam hal penambangan minyak bumi ini harus dilakukan oleh tenaga kerja yang mempunyai skill khusus dalam penambangan oleh karena itu tenaga kerja yang dipekerjakan ialah tenaga kerja yang sudah berpengalaman di bidangnya.

Kemudian, dengan kolapsnya pihak swasta pertama yaitu PT Witsun, kini KUD wargo tani makmur bekerjasama dengan swasta lain yaitu PT Idea Energi Blora dimana teknologi yang digunakan dalam penambangan berbeda dengan yang sebelumnya menggunakan sistem pompa yang satu sumur dapat dikendalikan oleh satu orang saja maka tenaga yang dibutuhkan memang sedikit sehingga mengharuskan untuk memangkas tenaga kerja lokal. Berbeda dengan dulu yang menggunakan teknologi dengan sistem timba yang satu sumur dapat dikendalikan oleh enam orang. Peralihan inipun belum menampakkan dampak signifikan kepada masyarakat karena tenaga kerja



lokal yang ikut berpartisipasi cukup sedikit yaitu hanya memperkerjakan kurang lebih 25 orang saja.

f. Dampak kebijakan

Adanya suatu kebijakan yang diimplementasikan, pasti terdapat dampak baik itu berupa dampak positif maupun negatif dalam pelaksanaannya.

Kaitannya dengan implementasi kebijakan penambangan minyak bumi pada sumur tua di Dukuh Banyubang ini dampak positif yang terjadi adalah antara lain: yang pertama, memberikan kewenangan pada KUD untuk mengusahakan penambangan sumur tua di struktur Banyubang Kecamatan Jiken, dimana dengan adanya penambangan ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar penambangan khususnya Dukuh Banyubang Desa Bangowan. Kedua, dapat menambah devisa negara karena hasil produksi yang didapatkan dari penambangan sumur tua ini langsung diserahkan kepada Pertamina sebagai kontraktor. Ketiga, dengan adanya Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan minyak bumi pada sumur tua ini dapat mencegah adanya penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat yang tentunya penambangan yang dilakukan tersebut adalah ilegal karena tidak ada ijin resmi dari pemerintah. Serta tidak memperhatikan aspek keselamatan, teknologi yang digunakan serta penjualan minyak yang tidak diserahkan kepada Pertamina. Hal ini lah yang menyebabkan kerugian pada negara.

Kemudian dampak negatif yang terjadi dari adanya kebijakan mengenai penambangan minyak bumi pada sumur tua ini ialah ; yang pertama, adanya



isu limbah oleh oknum masyarakat yang ditimbulkan dari hasil penambangan minyak bumi pada sumur tua, hal ini rentan dengan adanya konflik yang ditimbulkan. Namun hal ini dapat ditangani oleh pihak terkait karena tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa kasus limbah benar-benar mencemari persawahan warga. Yang kedua, jika keadaan finansial kurang mendukung maka penambangan tidak akan berjalan secara maksimal. Karena kebijakan ini mengatur bahwa KUD dapat mengelola penambangan dengan biaya sendiri sesuai dengan yang disebutkan dalam PTK No 23 Tahun 2009. hal ini membuat KUD harus berkerjasama dengan pihak swasta sebagai investor dalam segi modal dan teknologi yang digunakan pada penambangan. Kemudian terdapat bagi hasil dari produksi minyak bumi tersebut dibagi dengan pihak yang bersangkutan tersebut, yang mana dari harga minyak yang telah dibeli oleh PT Pertamina EP tersebut pihak KUD mendapatkan 10,3% yang didapatkan dari ongkos angkat dan angkut seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian 3,5% untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan 86,2% untuk pihak swasta selaku investor.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan

Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani

Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora

a. Faktor Pendukung

Dalam implementasi kebijakan pasti terdapat faktor-faktor yang mendukung jalannya implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya



faktor-faktor yang pendukung maka besar kemungkinan untuk membuktikan apakah kebijakan yang ada dapat berhasil diimplementasikan. Seperti pendapat Weirer dan Vining yang dikutip oleh Keban (2014:78) yang menyatakan bahwa terdapat tiga faktor umum yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik, antara lain: 1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, 2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan, dan 3) ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Teori yang dikemukakan tersebut terdapat faktor pendukung yang ditemui antara lain ialah adanya kejelasan kebijakan yang mengatur mengenai pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua yaitu berupa Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, yang didukung oleh kebijakan di Kabupaten Blora dalam pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut untuk mengatur ketentuan pelaksanaan tentang pemberian rekomendasi, pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua di Kabupaten Blora, kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Bupati Blora berupa Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Di Kabupaten Blora. Selain itu, dalam hal perijinan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua berkaitan erat dengan instansi dibidangnya yaitu SKK Migas dan Pertamina, untuk mendukung adanya Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun



2008 terdapat Pedoman Tata Kerja (PTK) yang disusun untuk menjadi pedoman bagi SKK Migas dan KKKS atau Pertamina dalam menangani permohonan KUD/BUMD untuk mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua yaitu PTK Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Kemudian adanya faktor sumber daya alam yang melimpah, dengan adanya sumber daya alam tentang keberadaan sumber minyak bumi dismilih yang menyebabkan adanya penambangan minyak bumi pada sumur tua yang sudah tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Kemudian adanya komitmen dari pengusaha penambangan yaitu KUD serta dukungan dari berbagai pihak seperti Pertamina, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas (UPTD) ESDM Provinsi Jawa Tengah yaitu BP3ESDM Wilayah Kendeng Selatan dan aktor-aktor terkait penambangan sumur tua dan pihak lainnya.

b. Faktor Penghambat

Kebijakan yang dibuat untuk diimplementasikan, dalam kegiatannya tidak mungkin tidak ada faktor penghambat yang terjadi. Faktor penghambat inilah yang menjadi penghambat jalannya implementasi kebijakan mengenai perusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua. faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut ;

- 1) Masih minimnya data data mengenai produksi sumur tua sebelumnya, mengingat sumur tua di Struktur Banyubang tersebut setelah tahun 1970 tidak pernah diusahakan lagi sehingga hal ini



menyulitkan pihak KUD dalam mengurus perijinan yang membutuhkan data mengenai produksi minyak bumi yang pernah dilakukan sebelumnya.

- 2) Proses perijinan yang terlalu panjang dari Kabupaten, Provinsi hingga Pusat sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan ijin pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua. Rumitnya pengurusan perijinan ini juga yang menyebabkan penambangan di sumur tua rentan dikelola secara ilegal.

- 3) Dalam segi finansial, KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken tentu dalam pelaksanaan penambangan di lapangan memerlukan modal besar dan teknologi yang digunakan dalam proses penambangan. Dengan Pertimbangan modal yang diperlukan sangat besar dan resiko yang ditanggung juga besar, KUD Wargo Tani Makmur yang baru bergerak dalam bidang mengusahakan penambangan minyak bumi pada sumur tua ini tidak mampu apabila harus menanggung semua permodalan dari nol. Maka dari itu KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken melakukan kerjasama dengan swasta untuk memodali operasional penambangan minyak bumi pada sumur tua yang ada di Struktur Banyubang tersebut.

- 4) Teknologi yang digunakan masih belum begitu mumpuni sehingga belum mampu memproduksi secara maksimal hasil minyak bumi yang terdapat di sumur tua Banyubang serta dengan teknologi yang masih sederhana ini tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di lapangan

begitu ada kendala. Namun teknologi yang di gunakan dalam penambangan ini sudah sesuai dengan persetujuan dari kontraktor.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan dengan adanya Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora sebagai berikut :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan : kebijakan penambangan minyak sumur tua ini mempunyai standar kebijakan yang jelas yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Dimana sasaran kebijakan ini jelas disebutkan bahwa yang dapat mengusahakan penambangan minyak bumi pada sumur tua hanya KUD, BUMD dan Kontraktor. Penelitian yang dilakukan ialah pada pertambangan minyak bumi pada sumur tua di Dukuh Banyubang Desa Bangowan Kecamatan Jiken yang mana telah diusahakan oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken yang bekerjasama dengan pihak swasta dalam perusahaan penambangan.
- 2) Sumber daya implementasi kebijakan ini ditunjang oleh berbagai sumberdaya-sumberdaya yang ada, meliputi sumber daya alam yang melimpah yaitu minyak bumi, sumber daya manusia yang memadai dimana masyarakat lokal ikut serta



- 3) dalam kegiatan penambangan minyak bumi pada sumur tua, serta dukungan finansial dan operasional dari pihak swasta.
- 4) Aktor atau organisasi yang terlibat : aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan mengenai penambangan minyak bumi pada sumur tua, dalam hal proses perijinan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang meliputi KUD, Wargo, Tani Makmur sebagai implementor yang mengusahakan ijin, PT Pertamina EP Asset 4, BP3ESDM, Bupati, Gubernur, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, SKK Migas, Menteri ESDM. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan terdapat dukungan dari Badan Lingkungan Hidup, Forum komunikasi pimpinan kecamatan, dan Kepala Desa.
- 5) Hubungan antar organisasi: hubungan antar organisasi sudah cukup baik, dalam koordinasi dalam hal perijinan penambangan maupun dimana ketika ada konflik dengan masyarakat semua pihak yang terlibat turun tangan untuk menyelesaikan masalah.
- 6) Kondisi sosial dan ekonomi : kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar masih relatif rendah dimana warga yang ikut berpartisipasi hanya menjadi tenaga kerja non skill karena pendidikan yang masih lemah. Dalam segi politik kebijakan ini tentunya mendapat dukungan dari semua pihak dan diterima dengan baik oleh masyarakat hal ini juga didukung dengan adanya sosialisasi di masyarakat.
- 7) Dampak kebijakan : dampak positif yang terjadi dalam implementasi kebijakan ini ialah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat



sekitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah devisa negara, mencegah adanya penambangan ilegal oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kemudian terdapat dampak negatif yaitu masih adanya konflik sosial yang terjadi.

Kemudian dalam hal faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua oleh KUD Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Bora, antara lain adalah,

- 1) faktor pendukung : Pertama, adanya kebijakan yang jelas dan terarah, yaitu adanya Peraturan Menteri ESDM No.01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Penambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, dimana dalam mengurus perijinan pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, Sumber Daya Alam berupa minyak bumi yang melimpah yang ada pada sumuran tua. Ketiga, komitmen para aktor atau organisasi yang membuat KUD sebagai implementor dapat mengimplementasikan kebijakan mengenai pengusahaan penambangan sumur minyak tua.
- 2) faktor penghambat : faktor yang menjadi penghambat kebijakan ini ialah minimnya data – data yang menyulitkan dalam mengurus perijinan, memerlukan waktu lama dalam perijinan pengusahaan, serta teknologi yang digunakan yang masih terkendala secara teknis sehingga menghambat jalannya produksi dalam memompa minyak di sumur tua.



Secara umum implementasi kebijakan mengenai penambangan minyak bumi pada sumur tua ini sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan minyak bumi pada sumur tua. Dimana KUD wargo tani makmur telah berhasil untuk mengusahakan sumur minyak tua di struktur Banyubang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora sejak tahun 2010. Namun masih terdapat kendala dalam kegiatan lapangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teknologi dan kurangnya koordinasi dengan desa, yang menyebabkan ketidaktahuan desa mengenai bagaimana perkembangan penambangan yang terjadi di lapangan penambangan. Hal ini dapat dikatakan bahwa implementasi yang diterapkan oleh KUD wargo tani makmur masih belum maksimal dalam kegiatannya dan perlu adanya perbaikan-perbaikan yang dijelaskan pada saran dari peneliti.

B. SARAN

Adapun saran dalam implementasi kebijakan mengenai penambangan minyak bumi pada sumur tua. Antara lain sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah : Adanya kebijakan mengenai pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua ini merupakan kebijakan yang baik untuk optimalisasi produksi minyak bumi pada sumur tua yang tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Namun akan lebih baik jika dalam kepengurusan perijinan pengusahaan lebih dimudahkan atau disederhanakan lagi dalam proses perijinan agar KUD yang



mengusahakannya tidak terlalu rumit dan memerlukan waktu lama dalam mendapatkan persetujuannya. Kemudian, berhubung pengusahaan minyak bumi ini memerlukan modal dana yang cukup banyak, baiknya pemerintah memfasilitasi KUD yang mengusahakan penambangan minyak bumi pada sumur tua.

b. Bagi KUD Wargo Tani Makmur:

1) KUD WATAMA Kecamatan Jiken sebagai salah satu implementor kebijakan pengusahaan penambangan minyak bumi pada sumur tua yang berpacu dalam Peraturan Menteri No. 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua ini, dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut sudah cukup baik. Namun dengan adanya konflik yang terjadi di masyarakat KUD bisa memberikan keterampilan lain pada program-program ataupun pelatihan-pelatihan mengenai penambangan agar masyarakat tidak sangat bergantung dalam pekerjaan penambangan, hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang lemah. Kemudian sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai limbah agar tidak terjadi konflik lagi dengan masyarakat.

2) Bekerjasama dengan investor yang benar-benar bonafide yang mempunyai modal besar dan dapat mengelola penambangan sumur tua secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi yang canggih sehingga dapat maksimal dalam kegiatan penambangan minyak bumi di sumur tua tersebut.



- 3) Kemudian memberikan jangka waktu atau kontrak yang jelas mengenai warga yang dijadikan sebagai tenaga kerja non skill, mengingat pekerjaan tersebut tidak berlangsung kontinum yang disesuaikan juga dengan kemampuan finansial pihak swasta, sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat.
- 4) Koordinasi dengan kepala desa dan pihak lainnya perlu ditingkatkan, karena penambangan sumur minyak tua tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal apapun mengenai penambangan perlu diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga kendala-kendala dilapangan dapat terkendali dengan baik, agar masyarakat dapat merasakan manfaat adanya penambangan sumur minyak tua tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijkasanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijkaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press: Malang.
- Abdurrahman, H., 2003, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, Juli.
- Arikunto, S., 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI*. PT Rineka Cipta : Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Dwiyanto, Arif. 2007. *Peranan Penambangan Minyak Tradisional Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Tesis Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Edugov Indonesia. 2015. *Pengelolaan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Oleh Kud Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora*. melalui: <http://edugovindonesia.com/web/component/content/article/2-uncategorised/13-pengelolaan-minyak-bumi-pada-sumur-tua-oleh-kaud-wargo-tani-makmur-kecamatan-jiken-kabupaten-blora>. [10/11/2017].
- Imam, Supardi, 2003. *Lingkungan hidup dan kelestariannya*. PT Alumni: Bandung.
- Indonesia. Invesment. 2016. *Minyak Bumi*. Melalui : <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item2672>. [11/11/2017].
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media: Yogyakarta.
- Kecamatan Jiken Dalam Angka, 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora



Kementerian ESDM, 2009. *KUD Kelola Sumur Tua*. Melalui:

<http://www.migas.esdm.go.id/post/read/KUD-Kelola-Sumur-Tua>...
[05/11/2017].

Kementerian ESDM, 2010. *Pengelolaan Sumur Tua Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Melalui: <http://migas.esdm.go.id/post/read/Pengelolaan-Sumur-Tua-Tingkatkan-Kesejahteraan-Masyarakat> [05/11/2017].

Miles, M.B., A.M. Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analisis: A Methods Sourcebook*. United State of Amerika: SAGE.

Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ketigapuluh lima. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.

---. 2014. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.

Peraturan Bupati Blora Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Di Kabupaten Blora.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Jakarta.

Soemarwoto, Otto. 1989. *Ekologi Lingkungan hidup dan Pembangunan*. Djambatan : Jakarta.

Solihin, M.A., dan Sudirja R., 2007. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Terpadu untuk Memperkuat Perekonomian Lokal, Integrated Natural Resources Management to Strengthen Local Economic*, Vol.8, No.15

Statistik Daerah Kabupaten Blora, 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Statistik Minyak dan Gas Bumi, 2015. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan Ketiga. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta: Bandung.



Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI: Yogyakarta.

Thoriqurrosyad, Afi. 2015. *Implementasi Kebijakan Penambangan Batu Gamping Pada Kawasan Bentang Alam Karst*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Administrasi, Malang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Kesembilan. Banyumedia Publishing. Malang

Wijaya, Dody Putra. 2016. *Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam Terhadap Kondisi Lingkungan Di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Administrasi, Malang.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Edisi Revisi. Media Pressindo: Yogyakarta.

Wordpress. 2015. *Asas-Asas Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Melalui: <https://idmining.wordpress.com/2015/05/18/asas-asas-hukum-pertambangan-mineral-dan-batubara/> [08/11/2017].

Zulkifli, Arif. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Grana Ilmu: Yogyakarta.